

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Konektivitas yang terbentuk antar negara di lingkup global pada dasarnya lebih bersifat *independent* sehingga setiap interaksi yang terbentuk memiliki hubungan kepada masing-masing negara yang terikat. Dalam hal ini, berbagai faktor bisa saja menjadi landasan interaksi negara seperti aspek ekonomi yang menarik perhatian antara negara maju dan berkembang seperti di kawasan *Middle East* berupa minyak bumi, atau aspek politik dan keamanan bagi negara *self-defense* untuk kerjasama aliansi pertahanan seperti di kawasan Asia Timur dan Indo-Pasifik.

Namun, interaksi antar negara juga mampu menjadi pemicu terciptanya situasi konflik dan permasalahan internasional yang justru melibatkan permusuhan antar negara atau antar negara dengan komunitas propaganda, etnis dan suku bangsa. Konflik internasional memberikan pengaruh yang besar untuk bisa mengubah tatanan internasional bahkan mampu melanggar hukum internasional sebagai media perdamaian dunia. Selain itu, konflik tersebut juga berlangsung dengan durasi paling lama sehingga selain memberikan kerugian bagi negara konflik, konflik dan perang juga melibatkan seluruh negara di dunia sebagai negara sekutu dan kerjasama aliansi akibat sifat *independent* negara itu sendiri dan interaksi yang tercipta telah lama.

Berbagai perang dan konflik internasional terbentuk dari berbagai aspek seperti konflik perbatasan, perdagangan dan ekonomi, ideologi, terorisme,

perebutan hak milik dan sengketa wilayah hingga kejahatan transnasionalis. Perang dan konflik tersebut dapat dilihat dari berbagai fakta yang ada seperti perang Rusia-Ukrainan yang berlangsung sampai sekarang akibat perebutan hak milik dan perluasan wilayah. Selain itu, konflik antara Gaza Palestina-Israel yang meledak baru-baru ini juga memberikan dampak negatif bukan hanya di antar negara terlibat tetapi juga seluruh dunia ikut berpartisipasi.

Pada faktanya, perang dan konflik memberikan citra yang buruk bagi setiap negara dan akan terus terjadi jika tanpa adanya resolusi perdamaian yang jelas. Bukan hanya konflik keamanan dan politik, tetapi konflik akibat penyalakan HAM yang diperbuat negara bagi kelompok minoritas suku dan agama juga mampu berkembang besar sebagai permasalahan internasional seperti munculnya diskriminasi hingga penghilangan identitas seperti *Islamphobia* di Eropa, Suku Kurdi di Irak dan Suriah hingga kaum kulit hitam di Amerika. Salah satu isu konflik terkait diskriminasi terhadap kelompok minoritas juga terjadi di Tiongkok antara pemerintah Tiongkok dan kelompok minoritas agama Uighur.

Berdasarkan data *Council of Foreign Relations*, jumlah entitas muslim di Tiongkok mengalami peningkatan pesat yang sebelumnya 22 juta jiwa pada tahun 2020 meningkat menjadi 28 juta jiwa di 2023 dengan proposisi etnis Hui dan kelompok Uighur terbanyak (Fakhriansyah, 2023). Akan tetapi, fakta kehidupan penduduk umat muslim di Tiongkok yang seringkali di isukan dengan berbagai paragmatis negatif nyatanya tidak dapat di abaikan. Terdapatnya perbedaan pandangan yang lebih kontroversial yang berkaitan

dengan Muslim di Tiongkok, terutama terkait dengan hak asasi manusia dan isu-isu etnis telah menciptakan keprihatinan.

Meskipun jumlah penduduk muslim di Tiongkok mengalami peningkatan sebesar 1,8% dari total penduduk Tiongkok, namun tetap saja mengalami diskriminasi sebagai etnis minoritas di tengah kehidupan represif etnis mayoritas oleh kelompok Etnis Han sebagai etnis terbesar yang mendominasi wilayah di Tiongkok sekitar 93% dari total jumlah penduduk negara tersebut. Kelompok muslim di Tiongkok terbagi dalam 10 kelompok etnis. Terbesar adalah etnis muslim Hui di Ningxia, wilayah Barat Tiongkok yang mayoritas di terdiri atas penduduk Han dan kelompok Uighur sebanyak 11 juta penduduk di daerah otonomi Tiongkok, Xinjiang (Fakhriansyah, 2023).

Berbagai bentuk diskriminasi terhadap umat muslim di Tiongkok, utamanya penindasan terhadap kelompok Uighur di wilayah Xinjiang mendapatkan perhatian internasional dari berbagai negara sebagai bentuk pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas. Konflik yang melibatkan pemerintah Tiongkok dengan kelompok Uighur telah terjadi sejak abad ke-20 dimana pemerintah Beijing menganggap kelompok Uighur sebagai kelompok ekstremis dan separatis yang melakukan pemberontakan dan ingin membebaskan diri. Kelompok Uighur justru menganggap kelompok mereka bukan bagian dari Tiongkok dikarenakan adanya perbedaan budaya. Perlakuan diskriminasi tersebut juga dialami oleh muslim Hui.

Berdasarkan Sistem politik Tiongkok yang keras dan ketat terhadap kelompok terorisme membuat muslim Hui terkena imbas seperti pembatasan

belajar agama, imam, larangan azan dan simbol-simbol ke-Islaman (Fakhriansyah, 2023). Organisasi HAM, *Amnesty International* berdasarkan laporan yang ditulis pada 10 Juni 2021 menjelaskan bahwa pemerintah Tiongkok dengan terang-terangan telah melakukan tindak kejahatan terhadap hak hidup dan kebebasan kemanusiaan seperti penyiksaan dan pelarangan kelompok etnik Kazakh, Uighur, dan entitas muslim lainnya yang berada pada wilayah Xinjiang, barat laut China sebagai tempat pemukiman kelompok Uighur dan Muslim minoritas lainnya.

Selain itu, *Amnesty International* juga mendesak PBB untuk terjun secara langsung melakukan investigasi. Bukan hanya itu, kelompok HAM di Barat dan beberapa negara menganggap kebijakan Tiongkok termasuk aksi genosida bagi kelompok Uighur, termasuk etnik Turki, meskipun masih terdapat kemungkinan sebagai tindakan genosida atau tidak (BBC News Indonesia, 2021). Kemudian, berdasarkan laporan *Human Rights Watch*, pemerintah Tiongkok adalah pihak yang memegang tindakan tinggi atas jenis kejahatan terhadap kehidupan kemanusiaan.

Namun demikian, Tiongkok tetap bersitegas memberikan tanggapan yang berbanding terbalik. Pemerintah Tiongkok memberikan pertanyaan dengan tegas bahwa pemimpin Tiongkok menilai dan menganggap stabilitas di wilayah Xinjiang berperan penting bagi keberhasilan program pembangunan infrastruktur global yang akan dilakukan dengan skala besar-besaran, sebagai *Belt and Road Initiative* (BRI). Program ini bertujuan untuk memperkuat hubungan Tiongkok dengan Asia Tengah dan sekitarnya sehingga Beijing

menganggap Xinjiang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Tiongkok selama ribuan tahun. Selain itu, Beijing juga mengecam tindakan “pengadilan” terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap Uighur karena hanya bertujuan menggaungkan fraksi anti-Tiongkok (Saju, 2021).

Meskipun ditengah kebijakan politik yang keras di tengah isu pelanggaran HAM dan diskriminasi terhadap kelompok muslim, namun pemerintah Tiongkok tetap berupaya untuk merepresentasikan perdamaian dan kehidupan normal bagi penduduk muslim. Dalam beberapa dekade terakhir, Tiongkok telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki hubungan dengan komunitas muslim baik secara eksternal maupun internal negeri. Tiongkok memperkenalkan kebijakan pembaruan dan membuka diri pada dunia luar dengan menggunakan diplomasi publik. Dalam era globalisasi sekarang, diplomasi publik memegang aspek strategis dalam hubungan antarnegara. Bukan hanya melalui saluran diplomatik formal, diplomasi publik juga melibatkan penyampaian pesan kepada masyarakat internasional dengan tujuan mempromosikan citra suatu negara.

Sebagai bagian dari upaya diplomasi publik tersebut, Tiongkok mempergunakan kekuatan media massa untuk bisa mendapatkan citra positif dan simpati dari masyarakat internasional terhadap kondisi negaranya. Sebagaimana yang diketahui bahwa media massa merupakan salah satu *tools* yang dipergunakan untuk melaksanakan diplomasi publik melalui *International Broadcasting* dengan cara peliputan pemberitaan baik berupa berita, radio, visualisasi hingga video dokumentasi. Sebagai negara besar,

Tiongkok memiliki beberapa media massa terbesar dengan jangkauan hampir keseluruhan dunia. Media massa tersebut antara lain *Xinhua News Agency*, *China Daily* dan *China Global Television Network* (CGTN).

Ketiga media massa tersebut memiliki peran dan tugas masing-masing terkait pemberitaan pemerintahan Tiongkok. Kantor Berita China (*Xinhua News Agency*) lebih berfokus untuk mempublikasikan berbagai kebijakan resmi pemerintahan Tiongkok, melakukan promosi program yang diselenggarakan oleh Tiongkok, serta meliput hal umum lainnya seperti bisnis, teknologi, budaya, *life style*, Tiongkok hingga dunia. Kantor Berita China (*Xinhua News Agency*) bahkan mengelola situs khusus BRI (Asia Society Policy Institusi, 2022). *China Daily* yang dibentuk pada tahun 1981 berfokus pada bisnis, budaya, *lifestyle*, *travel/food*, *sport* dan opini (Chinadaily). *Global Television Network* (CGTN) yang dibentuk pada tahun 2016 lebih berfokus pada penyiaran Sejarah, bisnis, teknologi, *travel* dan hiburan (CGTV).

Sebagai salah satu media massa terbesar Tiongkok, Kantor Berita China (*Xinhua News Agency*) memiliki pengaruh yang cukup luas di Tiongkok bahkan dikenal sebagai institusi yang setingkat dengan kementerian dibawah kekuasaan pemerintah Tiongkok. Kantor Berita China (*Xinhua News Agency*) yang dibentuk pada tahun 1931 oleh Partai Komunis Tiongkok sepenuhnya berada dibawah kewenangan *Ministry Administration of Radio, Film, and Television* (Britanica, 2024).

Berfungsi sebagai lembaga penyiaran internasional dengan menyediakan program pernyataan oleh pejabat Tiongkok. Kantor Berita China (*Xinhua News*

Agency) memiliki jaringan yang berorientasi lebih besar pada keuntungan seperti *Beijing News* dan *Beijing International* sebagai harian *online* yang diterbitkan oleh Kantor Berita China (*Xinhua News Agency*) dengan 32 biro di luar negeri sebagai koresponden dengan 6 biro regional center di Tiongkok. Untuk setiap harinya, sekitar 2700 jam program disiarkan yang mencakup berita dan cerita mengenai politik, ekonomi, budaya, sains, dan teknologi, serta peristiwa terkini (Jayarathne, 2023).

Sedangkan untuk proses penyebarannya, *Xinhua News Agency* memiliki berbagai kantor cabang yang menyebar luas. Terbukti, *Xinhua News Agency* menggunakan 65 bahasa dalam pelaporan internasionalnya. Kemudian, mayoritas wilayah dunia dijangkau lebih dari 50 pemancar gelombang pendek, yang disiarkan melalui internet dan beberapa satelit. Siaran Kantor Berita China (*Xinhua News Agency*) diputar ulang di banyak stasiun radio FM dan AM lokal di seluruh dunia (Jayarathne, 2023). Karenanya, Tiongkok, negara yang secara aktif menggunakan diplomasi publik, melalui Kantor Berita China (*Xinhua News Agency*) menjadi cara strategis secara transparan yang bisa tersampaikan ke berbagai negara termasuk isu dan hal umum lainnya terkait Tiongkok (Nurhud, 2019).

Meskipun beberapa dari media pemberitaan yang tersebar di Tiongkok sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mendapatkan perhatian publik, namun pemerintah Tiongkok lebih cenderung menggunakan Kantor Berita China (*Xinhua News Agency*) sebagai pusat penyiaran skala internasional yang berfungsi sebagai sarana diplomasi publik oleh pemerintah Tiongkok untuk

bisa memperbaiki citranya termasuk meliputi keseluruhan bagian masyarakat Tiongkok dan isu-isu yang sering diterimanya seperti demokrasi, ekonomi, regional hingga konflik muslim Uighur.

Dengan demikian, diplomasi publik Pemerintah Tiongkok melalui Kantor Berita China (*Xinhua News Agency*) akan menjadi sarana pemberitaan yang tingkat penggunaan tinggi oleh pemerintah Tiongkok guna memperluas berbagai media terkait Tiongkok, termasuk isu kelompok muslim Tiongkok. Melalui siaran-siaran yang disalurkan Kantor Berita China (*Xinhua News Agency*), maka akan memungkinkan Tiongkok untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat internasional seperti pemahaman praktik keagamaan, budaya, dan sumbangan umat muslim di Tiongkok. Dengan melihat adanya dampak strategis diplomasi publik pemerintah Tiongkok melalui Kantor Berita China (*Xinhua News Agency*), maka penulis tertarik mengangkat suatu penelitian dengan judul “Peran Kantor Berita Cina (*Xinhua News Agency*) Sebagai Aktor Diplomasi Publik Terhadap Isu Muslim Tiongkok”

B. BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH

Meningkatnya isu negatif terhadap kebijakan politik Tiongkok terkait pelanggaran kelompok etnis muslim pada tahun 2021-2024 menjadi citra buruk tersendiri bagi Tiongkok, utamanya dalam menciptakan perdamaian kelompok minoritas. Oleh karena itu, pemerintah Tiongkok mulai merepresentasikan upaya untuk membentuk citra baru dan memperbaiki hubungan dengan kelompok muslim baik secara internal maupun eksternal melalui strategi diplomasi publik dengan menggunakan media komunikasi.

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada peranan Kantor Berita Cina (*Xinhua News Agency*) sebagai pusat pemberitaan terbesar Tiongkok di bawah kewenangan Kementerian Administrasi Radio, Televisi dan Film sebagai aktor diplomasi publik Tiongkok terhadap isu kehidupan muslim Tiongkok beserta dampaknya sebagai media *International Broadcasting*.

Adapun beberapa rumusan masalah yang akan terjawab dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kantor Berita Cina (*Xinhua News Agency*) sebagai aktor diplomasi publik Tiongkok terhadap isu muslim Tiongkok?
2. Bagaimana dampak Kantor Berita Cina (*Xinhua News Agency*) sebagai aktor diplomasi publik Tiongkok terhadap isu muslim Tiongkok?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan dan rumusan masalah yang diangkat, maka secara umum tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan menjelaskan peran Kantor Berita Cina (*Xinhua News Agency*) sebagai aktor diplomasi publik Tiongkok terhadap isu muslim Tiongkok.
- b. Mengetahui dan menjelaskan dampak Kantor Berita Cina (*Xinhua News Agency*) sebagai aktor diplomasi publik Tiongkok terhadap isu muslim Tiongkok.

2. Kegunaan Penelitian

a. Penelitian Teoritis

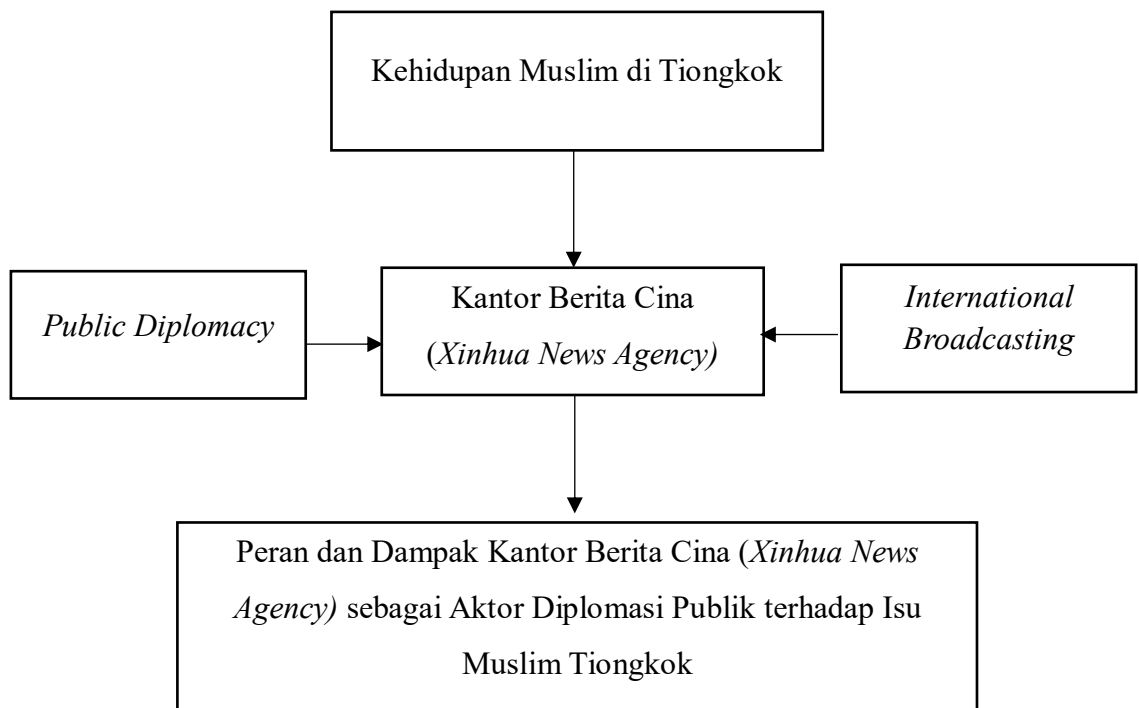
Manfaat teoritis adalah mengoperasionalkan konsep *broadcasting* sebagai media diplomasi publik dalam merepresentasikan peran dan dampak *Xinhua News Agency* dalam menjelaskan isu kehidupan umat muslim Tiongkok.

b. Penelitian Praktis

Manfaat penelitian secara praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk bisa meningkatkan pemahaman dan dipergunakan sebagai bahan referensi terhadap praktisi Ilmu Hubungan Internasional terkait peran *Xinhua News Agency* sebagai aktor diplomasi publik terhadap isu muslim Tiongkok.

D. KERANGKA KONSEPTUAL DAN DEFINISI OPERASIONAL

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan konsep *International Broadcasting* dan teori *Public Diplomacy*. Sebagai *tools* dari diplomasi publik, *International Broadcasting* dipergunakan untuk merealisasikan sekaligus penghubung antara Tiongkok dan masyarakat internasional di berbagai negara melalui penyebaran informasi oleh Kantor Berita Cina (*Xinhua News Agency*) dengan media radio, visualisasi hingga pemberitaan terkait Tiongkok dan muslim Tiongkok. Sehingga disetiap penyebaran informasi yang diberikan akan mampu menarik perhatian dan mengontrol pendapat publik terkait citra Tiongkok dan isu muslim Tiongkok.



Bagan 1.1 Kerangka Konsep dan Definisi Operasional

Berdasarkan pada kerangka konsep di atas, permasalahan analisis dalam penelitian ini melingkupi dinamika kehidupan muslim di Tiongkok, utamanya etnis Uighur yang merupakan kelompok minoritas di Xinjiang. Dinamika yang di maksud meliputi isu dan kebijakan pemerintah Tiongkok yang bersinggungan dengan pelanggaran dan perlindungan HAM muslim Uighur. Yang memberi citra buruk bagi Tiongkok. Oleh karena itu, melalui *Xinhua News Agency* sebagai media diplomasi publiknya, pemerintah Tiongkok akan membentuk kembali citra positifnya. Dengan menggunakan teori *International Broadcasting* dan *Public Diplomacy*, penelitian akan menjawab dan menganalisis pertanyaan penelitian terkait peran dan dampak Kantor Berita Cina (*Xinhua News Agency*) sebagai aktor diplomasi publik Tiongkok terhadap isu muslim Tiongkok.

1. *International Broadcasting*

Penggunaan media massa sebagai media interaksi menjadi salah satu unsur yang memungkinkan setiap negara untuk bisa mengontrol keadaan lingkungan eksternal dengan negara lainnya, terutama memegang kendali besar untuk bisa mendapatkan dukungan, perhatian dan simpati dari masyarakat internasional ditengah arus globalisasi yang pesat. Media massa menjadi jembatan bagi suatu negara untuk terlibat lebih jauh dengan sistem internasional. Selain memberikan dampak positif, media massa juga seringkali menjadi *boomerang* bagi penggunaannya sendiri seperti halnya penyebaran informasi yang kuat terkait politik dan demokrasi.

Media massa dalam hubungan internasional berperan penting sebagai penyebaran informasi terkait tatanan hubungan internasional yang memungkinkan setiap negara mampu mengetahui kondisi politik dan sosial negara lainnya tanpa harus melakukan kunjungan langsung. Sehingga media massa bisa dijadikan sebagai alat diplomasi, utama diplomasi publik untuk memberikan citra dan dukungan positif sekaligus menyerang negara tersebut melalui *voting* atau pemboikotan yang dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat.

Dalam hal ini, berbagai jenis media massa mengambil bagian penting untuk menyalurkan setiap informasi yang dimilikinya baik berupa pemberitaan, video konferensi, penyiaran radio hingga media sosial yang berskala internasional sehingga tidak sedikit setiap negara memiliki perusahaan media massa tersendiri seperti Al-Jazeera Qatar dan BBC News Inggris. Sebagai salah satu bagian diploma publik, *International Broadcasting* telah digunakan hampir setiap negara sebagai alternative penyebaran informasi. *International Broadcasting* telah ada sejak awal abad ke-20 dengan penggunaan radio skala gelombang pendek yang kemudian mengalami revolusi besar dengan memperluas jangkauan khalayak publik melalui penggunaan televisi satelit dan *telephone*.

International Broadcasting bahkan telah dibenarkan oleh setiap negara sebagai sarana diplomasi publik untuk mendeskripsikan gambaran tepat terkait suatu negara sebagai pemberi dana sehingga mampu memperluas ekspansinya, memberikan fasilitas penerimaan kebijakan luar negeri

bahkan hingga untuk tujuan ekonomi dan perdagangan internasional secara luas (Vincent, 2016: 46). Menurut Craig and George (1995) bahwa *International Broadcasting* merupakan istilah lain untuk pemberitaan kompleks segala informasi hingga hiburan yang di dukung oleh negara pendonor untuk bisa memperoleh popularitas dan perhatian diluar batas kendali negaranya.

Namun disamping tujuan tersebut, beberapa *International Broadcasting* juga justru menjadi media untuk membentuk propaganda dan menyudutkan negara melalui media penyiaran oleh negara pemilik. Sehingga selain disebut sebagai penyebaran transparan, namun tidak sedikit dari informasi tersebut bias dan rahasia untuk mendapatkan atau menyiarkan informasi rahasia negara yang dengan sengaja di sponsori dan dikendalikan oleh pemerintah, badan intelijen dan gerakan politik.

Akan tetapi, *International Broadcasting* tetap menjadi alternatif yang paling sering digunakan oleh setiap negara dengan tujuan mempromosikan segala bentuk budaya, ide, produk hingga persepektif. Bahkan dalam dekade terakhir ini, pertumbuhan ekspansi penggunaan *International Broadcasting* meningkat pesat terlebih lagi bagi *International Broadcasting* yang berada langsung dibawah naungan pemerintah. Meskipun seringkali mengalami keterlambatan karena krisis ekonomi global tetapi tidak menurunkan kualitasnya sebagai media diplomasi publik (Vincent, 2016: 46-47).

Menurut Riche (2008), *International Broadcasting* dipergunakan dengan dua tujuan besar yakni berfungsi sebagai media memperoleh informasi akurat dan sarana memfasilitasi hubungan internasional seluruh negara (Vincent, 2016: 47). Selain tujuan tersebut, *International Broadcasting* juga bisa dipergunakan oleh negara bersamaan dengan bagian-bagian diplomasi publik lainnya seperti peneliti audiens (*Listening*), informasi kebijakan (*Advocacy*), diplomasi budaya (*Cultural Diplomacy*) dan diplomasi pertukaran (*Exchange Diplomacy*).

Sebagai negara besar, pemberitaan Tiongkok telah menyebar dengan sangat pesat hingga ke berbagai negara dengan penggunaan bahasa masing-masing negara letak cabang penyebarannya. Lembaga *International Broadcasting* Tiongkok bahkan telah menjadi bagian integral dari Upaya diplomasi publik Tiongkok. Pada awal penggunaan *International Broadcasting*, Tiongkok menjadikannya sebagai media untuk menyerang serangkaian ideologis media barat di seluruh dunia. Namun seiring perkembangannya, peran *International Broadcasting* Tiongkok semakin luas. Pertama, sebagai saluran pengingat kealahannya pada abad ke-19 hingga ke-20. Kedua, Upaya penggambaran Tiongkok sebagai negara komunis global yang bertanggung jawab, menarik dan dihormati.

Melalui lembaga Kantor Berita Cina (*Xinhua News Agency*), Tiongkok mampu memperluas ekspansi dan mendapatkan citra positif ditengah isu krusial terkait tindakan diskriminasi dan pelanggaran HAM Muslim

Uighur. Tiongkok sendiri memiliki tiga lembaga *International Broadcasting* dengan fungsi dan tujuan masing-masing yang tentunya memiliki pengaruh besar di dunia. Adapun lembaga *International Broadcasting* tersebut yakni Kantor Berita Cina (*Xinhua News Agency*), *China Global Television Network* (CGTN) dan *China Daily* sebagai penyebar informasi sosial kehidupan masyarakat Tiongkok (Masak, 2021).

2. *Public Diplomacy*

Pesatnya perkembangan globalisasi memungkinkan antar negara untuk bisa menjalin hubungan kerjasama jauh lebih potensial dengan melewati lintas batas antar negara. Dalam hal ini, antar negara menggunakan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk bisa menarik perhatian negara lainnya, seperti ekonomi, politik, keamanan hingga sosial budaya. Jika dibandingkan dengan kerjasama yang berskala *high politic*, maka kerjasama di bidang sosial budaya lebih memudahkan negara untuk terjalin satu sama lain sebagai strategi *soft diplomacy* dengan menggunakan diplomasi publik untuk bisa membentuk kesepakatan bersama. Selain itu, diplomasi publik juga dapat digunakan kapanpun dengan berbagai aktor perantara seperti pemerintah, Perusahaan berskala NGO atau MNC, Individu hingga *influencer* yang mampu menjangkau lintas antar negara.

Jan Mellisen (2006), mengemukakan bahwa diplomasi publik merupakan alat yang digunakan oleh beberapa negara untuk bisa

mempengaruhi keputusan pihak lain melalui penggunaan potensial yang baik. Sehingga diplomasi publik juga dapat dikatakan sebagai strategi dalam membentuk citra dengan mempromosikan melalui penyebaran media informasi untuk mengiring opini publik global (Jayanti, Suwartiningsih & Ismoyo, 2019: 14). Dalam hal ini, diplomasi publik tentunya telah meliputi tindakan aktor yang dimaksudkan sebelumnya untuk meningkatkan hubungan antar negara secara baik (Peterson, 2014 dalam Tiffany & Azmi, 2020: 205).

Pendapat lainnya menyatakan diplomasi publik sebagai media aktivitas yang diawali dengan perbincangan untuk memungkinkan membentuk koneksi skala luas sehingga bisa menciptakan kepercayaan secara dua arah secara keseluruhan. Dalam hal ini, negara yang menggunakan diplomasi publik menjadikannya metode mendekati diri kepada publik secara luas untuk mencapai tujuan negara dengan menyebar luaskan norma dan nilai dari negara yang dimaksudkan (Trisni & Putri, 2023: 3). Menurut d'Hooghe, 2015, berbagai aktivitas digunakan dalam mengaplikasikan diplomasi publik meliputi aktivitas komunikasi strategis, *citizen diplomacy*, diplomasi budaya serta *nation-branding* (Trisni & Putri, 2023: 3).

Citizen diplomacy sendiri meliputi berbagai bentuk seperti memberikan hibah akademik, kegiatan kembar, program pelajar, bisnis, visitor programs, budaya dan olahraga. Sedangkan untuk diplomasi budaya meliputi pameran, festival budaya, promosi bahasa, pertunjukan budaya

serta partisipasi dalam pameran dunia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan juga aktivitas diplomasi publik mencakup beragam aktivitas dengan lingkup luas seperti komunikasi, bidang pendidikan, budaya, olahraga, seni, penyiaran, dan lainnya. Dalam hal ini, kegiatan-kegiatan tersebut direalisasikan secara dua arah, tidak dominan atau menguntungkan salah satunya, namun tetap menimbang kepentingan sasaran dari diplomasi tersebut.

Diplomasi publik untuk pertama kalinya dipergunakan oleh Edmond Gullion, Diplomat Amerika Serikat dalam tulisannya mengenai pengaruh opini publik terhadap rumusan dan melaksanakan keputusan pembuat kebijakan terhadap membuat kebijakan luar negeri tahun 1965. Pada mulanya, diplomasi publik hanya terbentuk bagi keharusan yang merupakan tanggung jawab bagi seorang diplomat terhadap publik. Ekspresi diplomasi tersebut kemudian di ciptakan ulang agar bisa merujuk pada aktivitas yang telah dilakukan para diplomator sejak dulu yang dikenal sebagai propaganda yang merupakan praktik diplomatik agar bisa bertindak kepada masyarakat secara langsung yang tidak hanya berfokus pada pemerintahan (Tiffany & Azmi, 2020: 205).

Diplomasi publik yang dipergunakan oleh berbagai negara pada dasarnya bertujuan agar memenuhi kepentingan nasional dengan berfokus pada masyarakat secara luas. Oleh karena itu, diplomasi publik memiliki beberapa tujuan keberhasilan. Menurut d'Hooghe (2015), terdapat enam unsur tujuan melaksanakan diplomasi publik yaitu, 1) Menemukan

pendukung dalam pelaksanaan kebijakan, 2) Menyebarluaskan citra negara, 3) Memperluas dialog kepada masyarakat, 4) Membangun hubungan untuk meningkatkan pemahaman antar negara, 5) Menciptakan solusi bersama untuk permasalahan transnasional dan 6) membentuk penyesuaian hubungan seiring dengan perubahan waktu (Trisni & Putri, 2023: 3).

Diantara enam tujuan pelaksanaan diplomasi publik, peneliti berfokus pada tujuan pertama yakni sebagai bentuk dukungan untuk pelaksanaan kebijakan Tiongkok terhadap muslim Uighur yang di fokuskan pada pemberitaan *Xinhua News Agency* yang pro terhadap pemerintah Tiongkok. Selain itu, juga berfokus pada tujuan kedua yakni untuk memperbaiki dan membentuk citra positif Tiongkok di lingkup internasional akibat pemberitaan buruk media-media barat terhadap kebijakan Tiongkok. Sehingga, tujuan keempat diplomasi publik untuk meningkatkan pemahaman antar negara dapat terealisasikan yang juga pembahasan lainnya dalam penelitian ini.

Pada umumnya, aktivitas diplomasi publik melibatkan berbagai actor dari level pemerintah, swasta hingga publik. Pemerintahan tersebut juga berupa pemerintah tingkat pusat hingga pemerintah daerah. Untuk tingkat pusat meliputi aktor strategis seperti menteri, pejabat kementerian dan pemimpin negara, serta perwakilan militer, diplomatik, keluarga kerajaan dan kantor perdagangan pariwisata. Sedangkan untuk level daerah, aktor tersebut meliputi perwakilan ditingkat provinsi / kota dan pemerintah

daerah. Beberapa lainnya juga terdapat berbagai aktor non-negara seperti *NGOs and Lobby groups, the academic world, business, cultural organizations, dan Citizen* (Trisni & Putri, 2023: 4).

Sebagai negara yang besar, Tiongkok menggunakan diplomasi publik dengan sangat strategis untuk membangun citra positif ditengah isu krusial mengenai pelanggaran HAM terhadap kelompok muslim Uighur oleh berbagai media dan organisasi internasional lainnya. Dengan Kantor Berita Cina (*Xinhua News Agency*), Tiongkok menjangkau seluruh Masyarakat internasional sebagai media untuk menggambarkan kondisi dan keadaan muslim di Tiongkok. Hal ini menciptakan pandangan bahwa Tiongkok ingin mengkomunikasikan pesan positif kepada tentang kehidupan umat muslim di negara tersebut.

E. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian kualitatif tepat di gunakan untuk memperjelas hasil akhir penelitian secara umum dan terperinci serta analitik dengan meliputi metode pengumpulan. Informasi terkait kejadian dieksplorasi secara mendalam. Dengan pendekatan kualitatif, maka penulis akan bisa menjelaskan peran dan dampak Kantor Berita Cina (*Xinhua News Agency*) sebagai aktor diplomasi publik dalam menjelaskan isu muslim Tiongkok.

Penelitian ini oleh penulis mempergunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian ini memiliki kapasitas untuk menciptakan skema menyeluruh serta rinci tentang peristiwa yang sedang diteliti. Penelitian deskriptif juga mencakup pemeriksaan variabel-variabel lain yang berkaitan dengan masalah atau studi kasus. Karena itu, untuk penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dipilih karena agar bisa bertujuan guna memberikan gambaran yang detail tentang permasalahan yang diangkat. Gumilar Rusliwa dalam tulisannya yang berjudul "Memahami Metode Kualitatif" mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif mencirikan pendekatan penelitian ini sebagai upaya untuk mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya (Somantri, 2005).

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Data primer di dapatkan melalui observasi wawancara dan kuesioner yang di kumpulkan terkait isu penelitian. Sedangkan data sekunder termasuk data yang di kaji dengan cara *literature review* dengan cakupan objek meliputi fenomena yang tengah terjadi. Penelitian ini juga, peneliti hanya berfokus menggunakan data sekunder berupa Deskripsi peran dan dampak Kantor Berita Cina (*Xinhua News Agency*) sebagai aktor diplomasi publik dalam menjelaskan isu kehidupan umat muslim Tiongkok.

Sedangkan data yang tersusun untuk penelitian oleh penulis ini didapatkan sesuai objek data sekunder yang secara umum ditemukan melalui beberapa media informasi dengan keterkaitan masalah yang sesuai untuk di analisis. Data sekunder tersebut berupa narasi resmi pihak pemerintah pemerintahan Tiongkok yang diakses dengan menganalisis beberapa pemberitaan Tiongkok seperti *China Global Television Network* (CGTN) dan *China Daily*. Sedangkan untuk pernyataan berupa kebijakan ditelusuri dari dokumen resmi di beberapa website resmi pemerintah Tiongkok seperti Kementerian Perindustrian dan Teknologi (MIIT) serta berita yang dikutip langsung dari dari situs resmi Kantor Berita Cina (*Xinhua News Agency*). Berbagai data pendukung lainnya seperti jurnal dan buku *Diplomacy Public* dan *International Broadcasting* diakses melalui situs *google scholar* dan *Journal Storage (JSTOR)*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam konteks penelitian, metode pengumpulan data menjadi unsur krusial yang berpengaruh pada kesuksesan penelitian. Teknik pengumpulan data terkait dengan strategi yang digunakan oleh peneliti dalam mengakses dan mengumpulkan data serta menentukan sumber data yang akan digunakan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Istilah "studi kepustakaan" digunakan karena data dan referensi yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian berasal dari sumber-sumber di perpustakaan, seperti buku, jurnal, dokumen, majalah, dan lain sejenisnya yang dapat diakses melalui *luring* dan *non-luring* (Koetjaraningrat dalam Yogi Febriansyah, 2015).

4. Teknik Analisis Data

Penulis akan menganalisis data penelitian yang diperoleh dengan menerapkan teknik analisis data kualitatif, yaitu menganalisis permasalahan yang diteliti dengan penggambaran yang berlandaskan pada fakta – fakta yang telah ada secara objektif kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah analisis yang akurat dan kuat sampai pada suatu kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, perhatian besar diberikan pada peristiwa dan kedalaman konteksnya. Para peneliti kualitatif melihat realitas sebagai hasil rekonstruksi yang dilakukan oleh individu yang terlibat dalam situasi sosial. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif

untuk menguraikan permasalahan dengan rincian dan kejelasan yang lebih besar, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam (Sumandi Suryabrata, 2010).

5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kepenulisan deduktif. Dengan metode deduktif, penulis akan menggambarkan permasalahan yang diteliti secara umum berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian gambaran umum tersebut diklarifikasikan hingga pada akhirnya menarik kesimpulan secara khusus dalam menganalisis data sebagai dari tujuan penelitian ini. Konsep atau teori yang telah dikumpulkan dikaitkan sebagai bahan analisis data.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan merupakan penjabaran secara deskriptif mengenai gambaran terhadap kegiatan penelitian dan penyusunan skripsi sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN: Mencakup terkait latar belakang permasalahan, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA: Memuat deskripsi teoritis mengenai variabel penelitian yang di gunakan dengan mengkaji berbagai argumen dan tinjauan teori sebagai landasan penelitian. Selain itu juga menjelaskan terkait penelitian terdahulu untuk mendapatkan gap atau perbandingan penelitian sebelumnya.

BAB 3 GAMBARAN UMUM: Memuat mengenai deskripsi umum tentang kehidupan umat muslim di Tiongkok dan Kantor Berita Cina (*Xinhua News Agency*) sebagai atkro diplomasi public Tiongkok.

BAB 4 ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN: Berisikan penjelasan hasil penelitian yang telah mengalami proses pengujian terhadap hipotesis dengan berlandaskan pada data-data yang dikumpulkan saat penelitian.

BAB 5 PENUTUP: Berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari keseluruhan hasil penelitian sekaligus bagian akhir yang memuat daftar acuan sumber data yang digunakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *International Broadcasting*

Media massa telah menjadi sarana interaksi yang memungkinkan bagi setiap negara untuk bisa menganalisis, mengontrol dan mempengaruhi keadaan baik di lingkup eksternal maupun internal dengan negara lainnya, terutama merujuk sebagai pemegang kendali besar atas dukungan, perhatian dan simpati yang bisa di dapatkan dari masyarakat internasional di berbagai negara ditengah pesatnya arus globalisasi yang semakin luas. Media massa dijadikan media jembatan bagi suatu negara untuk terlibat lebih jauh dengan sistem internasional.

Penggunaan media massa dalam tatanan hubungan internasional tidak hanya berperan strategis sebagai penyiaran informasi mengenai system dan hubungan internasional yang mendekatkan setiap negara untuk mampu mengetahui kondisi politik dan sosial dengan negara lainnya, tetapi juga untuk membentuk hubungan strategis yang bisa terjalin diantara dua atau lebih negara dengan jangkauan yang luas. Sehingga media massa menjadi alat diplomasi publik untuk membentuk citra dan dukungan, tetapi juga berpotensi untuk menyerang negara tersebut melalui pemboikotan yang dilakukan oleh masyarakat.

Penyiaran sebagai sistem penyebarluasan informasi dengan jangkauan yang luas terhadap khalayak umum dapat dijumpai dalam berbagai media seperti siaran radio, televisi, dan *telephone* bahkan secara tidak langsung tidak

bisa terlepas dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Penyiaran melalui media perangkat elektronik semakin heterogen dan terus berkembang setiap waktu dengan berbagai fungsi yang semakin beragam seperti penyiaran urusan publik, penyiaran komunitas hingga penyiaran berskala internasional (*International Broadcasting*).

International Broadcasting memiliki jangkauan lebih luas sehingga dikenal sebagai penyiaran lintas batas antar negara dibandingkan *domestic broadcasting*. Menurut Douai (2009) yang dikutip dalam Price (2003) mengemukakan bahwa *International Broadcasting* lebih umum dikenal dengan istilah kombinasi kompleksitas berita, informasi, kebudayaan dan hiburan yang dipelopori oleh negara yang kemudian ditujukan kepada negara lain dengan populasi yang lebih luas. Tujuannya adalah untuk membentuk opini dan kepemimpinan di masyarakat negara lain (Vincent, 2016: 45). Dalam hal ini, *International Broadcasting* menargetkan pihak negara yang tingkat populasinya tinggi sehingga mampu memberikan pengaruh guna untuk mengiring opini yang pro terhadap informasi yang diberikan oleh negara tersebut.

Dengan cakupan dan jangkauan yang luas, *International Broadcasting* sangat strategis untuk digunakan sebagai *tools* utama bagi negara-negara yang menganggap dan mempergunakan diplomasi publik sebagai bagian penting dalam strategi diplomatiknya. Hal tersebut dikarenakan *International Broadcasting* sangat efisien untuk meningkatkan citra positif sebuah negara,

kedudukan serta persepsi internasional terhadap masyarakat asing di negara lain.

Namun demikian, dalam mewujudkan keberhasilan *International Broadcasting*, maka kredibilitas penyiaran dan kemampuan untuk menarik perhatian masyarakat internasional, konsistensi, kerjasama dengan kementerian dan pendanaan yang stabil menjadi faktor penting mewujudkan keberhasilan tersebut. Hal tersebut dapat terlihat dengan berbagai industri penyiaran telah mengalami periode ekspansi dan transformasi yang cepat selama 15 tahun terakhir, bahkan penyiaran dalam bentuk pelayanan berita televisi telah ditayangkan selama 24 jam (Vincent, 2016: 45).

Pada awalnya, *International Broadcasting* dipergunakan melalui gelombang radio pendek pada awal abad ke-20 dimana revolusi teknologi komunikasi menjadi prioritas utama dalam menjangkau dan mencakup audiens untuk tujuan diplomasi publik. Penggunaan teknologi tersebut terus meningkat mulai dari populasi televisi satelit dan penggunaan *telephone* sebagai perangkat komunikasi dengan kemudahan akses. Jauh sebelum itu, *International Broadcasting* telah berevolusi selama 80 tahun dimana gaya penyiaran dan pemikiran penyiaran terus berkembang di setiap masa.

Pada masa kolonial Hindia Belanda mendorong pemerintah Belanda memulai *International Broadcasting* pada tahun 1927. Penyiaran tersebut lalu diikuti oleh *BBC Empire Service*, Inggris pada 1932. Kemudian pada masa Perang Dunia ke-II, tentara kekaisaran Jepang menggunakan *International Broadcasting* sebagai alat propaganda dan *Voice of America* (VOA)

diperdengarkan pertama kali di 1942 peristiwa pengeboman *Pearl Harbou* dilakukan (Vincent, 2016: 46).

Perkembangan teknologi telah memberikan dampak besar pada penyiaran *International Broadcasting* sebagai alat diplomasi publik. Menurut Hopkin (1999), pada dasarnya, untuk melakukan diplomasi publik, pemerintahan setiap negara mempergunakan media dengan jangkauan yang luas yang bisa mencakup berbagai hal seperti diplomasi budaya, tur, lembaga kebudayaan seperti *Japan Foundation* dan *British Council*, diplomasi pendidikan dan beasiswa. Oleh karena cakupan yang luas, maka secara keseluruhan *International Broadcasting* yang lebih khusus untuk di pergunakan. (Vincent, 2016: 47). Saat ini, *International Broadcasting* telah digunakan oleh negara maju dan negara berkembang di berbagai belahan dunia untuk mempromosikan kebudayaan, ide, perspektif hingga produk. Sehingga untuk dekade terakhir, *International Broadcasting* sebagian besar di danai langsung oleh pemerintah.

International Broadcasting bahkan telah dibenarkan oleh setiap negara sebagai sarana diplomasi publik untuk mendeskripsikan gambaran terkait suatu negara sebagai pemberi dana sehingga mampu memperluas ekspansinya, memberikan fasilitas penerimaan kebijakan luar negeri bahkan hingga untuk tujuan ekonomi dan perdagangan internasional secara luas (Vincent, 2016: 46). Menurut Craig and George (1995), *International Broadcasting* merupakan istilah lain untuk pemberitaan kompleks segala informasi hingga hiburan yang di dukung oleh negara pendonor untuk bisa memperoleh popularitas dan perhatian diluar batas kendali negaranya.

Namun disamping tujuan tersebut, beberapa *International Broadcasting* juga justru menjadi media untuk membentuk propaganda dan menyudutkan negara melalui media penyiaran oleh negara pemilik. Sehingga selain disebut sebagai penyebaran transparan, tidak sedikit dari informasi tersebut bias dan rahasia untuk mendapatkan informasi rahasia negara yang dengan sengaja disponsori dan dikendalikan pemerintah, badan intelijen dan gerakan politik.

Menurut Riche (2008), *International Broadcasting* dipergunakan dengan dua tujuan besar yakni berfungsi sebagai media memperoleh informasi akurat dan sarana memfasilitasi hubungan internasional seluruh negara (Vincent, 2016: 47). Selain tujuan tersebut, *International Broadcasting* juga bisa dipergunakan oleh negara bersamaan dengan bagian-bagian diplomasi publik lainnya seperti peneliti audiens (*Listening*), informasi kebijakan (*Advocacy*), diplomasi budaya (*Cultural Diplomacy*) dan diplomasi pertukaran (*Exchange Diplomacy*). Mengutip pendapat Riche (2008), berdasarkan hasil survei para pakar media yang telah melakukan perbandingan penyiaran di negara Amerika, Inggris, Perancis dan Jerman.

Maka dapat diuraikan fungsi *International Broadcasting* antara lain: (1) berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan informasi peristiwa dengan akurat *International Broadcasting* mengumpulkan dan merangkum keseluruhan informasi berupa konflik dan kesulitan yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga membentuk ruang pengumpulan informasi antar masyarakat (Vincent, 2016: 48).

Selain itu, *International Broadcasting* juga dapat digunakan untuk membantu pemeliharaan konflik dengan menjadikannya media negosiasi saat konflik terjadi. (2) Alat untuk memfasilitasi hubungan internasional dengan menekankan peran informasi dalam hubungan internasional sebagai sarana komunikasi dan pemahaman antar manusia dan bangsa. (3) Memberikan kompensasi jika berkurangnya pasokan media di wilayah terbelakang.

Dalam hal ini, *International Broadcasting* berperan sebagai komunitas regional dan global yang bertujuan untuk mendukung proses demokrasi dalam masyarakat, menjalin kemitraan dengan media lokal serta meningkatkan dialog antar bangsa. (4) Sarana untuk memproyeksikan dan meningkatkan citra nasional. *International Broadcasting* sebagai alat diplomasi publik sehingga tidak hanya terbatas pada dialog, kontak dan aktivitas lintas negara, tetapi juga membentuk efisiensi negara dengan pendekatan citra negara melalui media.

(5) *International Broadcasting* sebagai alat penyiar kebudayaan dan menjangkau perhatian masyarakat untuk membentuk citra sehingga *International Broadcasting* tidak hanya semata-mata untuk menyiarkan berita. (6) Menawarkan koneksi ke negara asal sebagai bentuk rekan senegara di luar negeri untuk menjaga kontak baik dengan sesama warga negara atau berbagi berita dari negara asal untuk program pertukaran budaya. (7) Memungkinkan adanya penyebab keyakinan, konsep dan ideologi sosial politik.

Hal tersebut dikarenakan, untuk bisa memajukan kepentingan dan kebijakan luar negeri, maka suatu negara akan menyebarluaskan terkait urusan internasional termasuk ideologi sosial politiknya. Dengan *International Broadcasting* akan lebih mempermudah. (8) Berfungsi sebagai alat penyelesaian informasi. *International Broadcasting* dapat digunakan sebagai media dialog dan upaya penyelesaian serangkaian konflik global dengan memfasilitasi ruang komentar dan analisis berita (Vincent, 2016: 46). Beberapa fungsi tersebut mendeskripsikan bagaimana *International Broadcasting* berpengaruh penting dalam membentuk opini masyarakat internasional terhadap pemberitaan yang diberikan.

Sebagai negara besar, pemberitaan Tiongkok telah menyebar dengan sangat pesat hingga ke berbagai negara dengan penggunaan bahasa masing-masing negara letak cabang penyebarannya. Lembaga *International Broadcasting* Tiongkok bahkan telah menjadi bagian integral dari upaya diplomasi publik Tiongkok. Pada awal penggunaan *International Broadcasting*, Tiongkok menjadikannya sebagai media untuk menyerang serangkaian ideologis media barat di seluruh dunia. Namun seiring perkembangannya, peran *International Broadcasting* Tiongkok semakin luas. Pertama, sebagai saluran pengingat kealahannya pada abad ke-19 hingga ke-20. Kedua, upaya penggambaran Tiongkok sebagai negara komunis global yang bertanggung jawab, menarik dan dihormati.

Melalui media massa, Tiongkok memperluas ekspansi dan mendapatkan citra positif ditengah isu krusial terkait tindakan diskriminasi dan pelanggaran

HAM muslim Uighur. Tiongkok sendiri memiliki tiga lembaga *International Broadcasting* dengan pengaruh besar di dunia diantaranya yakni Kantor Berita Cina (*Xinhua News Agency*), *China Global Television Network* (CGTN) dan *China Daily* (Masak, 2021). *Xinhua News Agency* memiliki pengaruh yang strategis lembaga *International Broadcasting* untuk menyebarkan informasi akurat tentang kondisi di Tiongkok, khususnya terkait isu diskriminasi etnis Uighur sebagai bentuk pelanggaran HAM. Melalui *Xinhua News Agency*, setiap pemberitaannya secara khusus merujuk pada pandangan positif terkait kebijakan pemerintah melalui naarsi yang berpandangan positif tentang Tiongkok dan juga bertindak sebagai komunitas penyelenggara event internasional yang mewadahi para jurnalis di Xinjiang.

B. *Public Diplomacy*

Perkembangan globalisasi saat ini tidak hanya merujuk pada peningkatan teknologi dan telekomunikasi yang membangun hubungan antar negara, tetapi juga telah menghapus batas-batas yang menjadikan tiap wilayah mampu bekerja sama tanpa perlu mendatangi negara tersebut secara langsung. Hal tersebut merujuk pada penggunaan diplomasi publik yang semakin intens digunakan sebagai negosiasi yang menguntungkan. Melalui kebudayaan dan *brand national*, tujuan dari kepentingan nasional dapat terealisasikan. Namun, diplomasi publik juga cenderung digunakan sebagai sarana propaganda untuk mengembalikan citra negara yang dinilai sesuai dengan prinsip nasional negara.

Menurut Sharp (2005) mengemukakan bahwa diplomasi publik merupakan proses metode pendekatan yang dilakukan kepada khalayak umum secara langsung untuk mendukung peningkataan sekaligus mewujudkan kepentingan negara dengan melalui penyebaran norma yang di anut oleh suatu negara berupa ideologi dan kebudayaan (Trisni dan Ardita, 2023: 2). Sedangkan menurut pandangan lain yang dikemukakan oleh Jan Mellisen (2006) menyatakan diplomasi publik merupakan sarana oleh beberapa negara agar bisa mengubah kebijakan dan keputusan negara lain melalui penggunaan cara potensial yang baik.

Sehingga diplomasi publik juga dapat dikatakan sebagai strategi yang dipergunakan sebuah negara dalam membentuk citra dengan menyebarluaskan kepentingan negaranya melalui pemahaman dan penyebaran informasi untuk mengubah pandangan publik di negara lain (Jayanti, Suwartiningsih & Ismoyo, 2019: 14). Dalam hal ini, diplomasi publik dibangun untuk membentuk dialog konektivitas jangka lama hingga memungkinkan menciptakan keyakinan secara menyeluruh.

Pandangan lainnya oleh Gullion dalam Cull (2009) menyatakan diplomasi publik adalah serangkaian aktivitas 2 arah guna dalam menjangkau *audience* dengan berfokus pada penyebaran nilai-nilai dan untuk mendapatkan dukungan sekaligus perhatian publik. Oleh karena itu, aktivitas yang berpeluang besar untuk bisa menarik perhatian dan kepercayaan publik dilakukan dengan pola hubungan timbal balik. Sehingga untuk bisa menjelaskan lebih spesifik bentuk

aktivitas diplomasi publik tersebut, terdapat beberapa bentuk aktivitas diplomasi publik yang umumnya dipergunakan oleh.

Dikutip dari pendapat d'Honghe bahwa aktivitas-aktivitas diplomasi publik meliputi *citizen diplomacy*, *cultural diplomacy*, komunikasi strategis serta menonjolkan *nation-branding*. Adapun yang dimaksud *citizen diplomacy* meliputi program pertukaran, hibah akademis, *visitor programs*, dan kegiatan bisnis. Sedangkan *cultural diplomacy* terdiri atas pertunjukan seni, festival budaya hingga promosi budaya dan bahasa (Trisni dan Ardita, 2023: 3). Keseluruhan kegiatan diplomasi publik dipergunakan sebagai media bagi negara mempengaruhi negara lainnya secara langsung tanpa mempergunakan tindakan politik.

Pada dasarnya, diplomasi publik untuk pertama kalinya digunakan oleh Edmond Gullion, seorang Diplomat Amerika Serikat dalam tulisannya mengenai pengaruh opini publik terhadap perumusan dan pelaksanaan keputusan pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan luar negeri pada tahun 1965. Pada awalnya, diplomasi publik hanya berwujud kepada keharusan yang menjadi tugas dan tanggung jawab bagi seorang diplomat terhadap masyarakat. Ekspresi diplomasi publik kemudian dibuat kembali untuk bisa menunjuk kegiatan yang telah dilakukan para diplomat sejak lama yang dikenal sebagai propaganda atau informasi, yaitu praktik diplomatik yang ditujukan untuk bertindak secara langsung kepada masyarakat dan tidak lagi berfokus pada pemerintah saja. Kegiatan tersebut lalu berkembang sangat pesat dari Perang Dunia I (Tiffany & Azmi, 2020: 205).

Dalam beberapa dekade terakhir, definisi tradisional terkait diplomasi publik guna mengelola hubungan internasional dianggap sebagai praktik rahasia dan terlindung dari pandangan publik. Namun dalam diplomasi modern, praktik diplomasi publik kemudian dilakukan di negara tempat tinggal, secara langsung melalui media dan pemerintah turut ikut melakukannya. Dalam sejarahnya, diplomasi publik dilakukan pertama kali pada masa Perang Dingin dimana Amerika Serikat melancarkan perang hubungan masyarakat internasional dengan Uni Soviet yang kemudian diplomasi Amerika Serikat, Edward Gullion menciptakan istilah diplomasi publik tersebut. Studi diplomasi publik tersebut kemudian berkembang pesat mempengaruhi komunikasi diplomatik modern seperti konsep *soft power* oleh Joseph Nye, *nation and place branding* serta identitas kompetitif (Helmer, 2016: 402).

Diplomasi publik nyatanya juga melibatkan banyak aktor sebagai aktivis diplomasi publik. Aktor negara seperti pemerintah, swasta hingga masyarakat umum. di tingkat pemerintah pusat meliputi pemimpin negara, menteri dan pejabat di kementerian pemerintahan serta perwakilan diplomatik, kemiliteran dan anggota keluarga Kerajaan. Sedangkan di tingkat pemerintahan daerah meliputi perwakilan pemerintah daerah, kota, provinsi dan otoritas pelabuhan (d'Hooghe, 2015). Sementara untuk aktor non-negara meliputi *The Academic world (representative universities and school, research institutes and student's organization)*, *NGOs and Lobby groups (national and international advocacy groups)*, *Business (companies and chambers of commerce)*, *Cultural*

Organizations (representative gallery, theater, performing groups and festivals), dan *Citizen (friends association and individual citizen)* (d'Hooghe, 2015). Dengan kata lain keseluruhan elemen dilingkup pemerintahan negara dapat berperan sebagai aktor diplomasi publik dengan cakupan tugas dan fungsi masing-masing.

Diplomasi publik juga seringkali di definisikan sebagai instrument *soft power* sehingga mampu melakukan hubungan kerjasama dengan pendekatan yang lebih bersahabat dan berbanding terbalik dengan penggunaan aspek politik dan militer. Oleh karena itu, diplomasi publik juga terdiri atas beberapa komponen-komponen umum untuk bisa digunakan sebagai *soft power*. Adapun komponen-komponen tersebut terdiri atas 1) *Listening, Advocacy, Cultural Diplomacy, Exchange, International Broadcasting* dan *Psychological* (Cull, 2009).

Lebih lanjut, Joseph Nye menyatakan bahwa diplomasi publik sebagai alat yang digunakan untuk menghubungkan *soft power* maka dikenal sebagai “konversi daya” dimana komunikasi dan kolaborasi mampu mengubah *soft power* sebagai daya tarik untuk bisa menarik perhatian publik asing (Nye, 2004). Dalam hal ini, diplomasi publik dapat memudahkan suatu negara membentuk hubungan kerjasama di berbagai bidang dengan konteks budaya dan pendidikan tanpa adanya politisasi dalam pengaruhnya.

Sehingga untuk menganalisis lebih lanjut, Joseph Nye (2004) mengemukakan dan membagi tujuan diplomasi publik menjadi tiga dimensi utama yang berbeda, dimana masing-masing proporsinya *relative* dan berbeda

dari informasi pemerintah secara langsung dan hubungan budaya jangka panjang. Dimensi pertama yaitu *Daily Communications* dengan melibatkan penjelasan konteks kebijakan dalam dan luar negeri, melibatkan persiapan untuk menghadapi krisis dan melawan serangan. Dimensi kedua adalah *Strategic Communications* untuk melakukan kampanye publik dan Dimensi ketiga yakni *Public Diplomacy* sebagai pengembangan hubungan dengan individu melalui beasiswa, pertukaran beasiswa, konferensi dan saluran media (Santoso, Hidayat dan Dermawan, 2020: 25). Dalam hal ini, diplomasi publik memainkan peranan penting untuk menarik perhatian publik.

Sedangkan menurut d'Honghe menyatakan bahwa konsep *soft power* dapat dijadikan sebagai strategi diplomasi publik sehingga memungkinkan untuk dianalisis lebih lanjut. Selain itu, dalam pandangan d'Honghe juga menyatakan bahwa *soft power* sebagai landasan untuk melakukan diplomasi publik dikarenakan keberadaan *soft power* dijadikan sebagai tolak ukur untuk keberhasilan diplomasi publik dan diplomasi publik berupaya untuk memajukan nilai yang menarik dari suatu negara dengan mengubah sumber daya tarik *soft power* negara menjadi ketertarikan perhatian publik (Trisni dan Putri, 2023: 7). Keseluruhan hal tersebut dapat terwujud dengan mengedepankan pengaruh secara langsung dengan mempergunakan daya tarik atau national branding untuk menggait beberapa negara.

Diplomasi publik yang digunakan oleh setiap negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional dengan berfokus pada masyarakat secara luas. Oleh karena itu, diplomasi publik memiliki beberapa

tujuan keberhasilan. Menurut d'Hooghe (2015), menjelaskan bahwa terdapat enam tujuan pelaksanaan diplomasi publik yaitu; 1) Mencari dukungan untuk pelaksanaan kebijakan, 2) Mempromosikan citra negara, 3) Mengembangkan dialog kepada masyarakat, 4) Membangun hubungan untuk meningkatkan pemahaman antar negara, 5) Menciptakan solusi bersama untuk permasalahan transnasional dan 6) membentuk penyesuaian hubungan seiring dengan perubahan waktu. Sedangkan menurut Van Han (2005), tujuan diplomasi terbagi atas dua sebagai tujuan jangka pendek yakni mempengaruhi opini dan memobilisasi publik asing (Trisni & Putri, 2023: 3). Dengan demikian, maka tujuan dari diplomasi publik dapat memberikan keberhasilan dalam proses pengaruhnya.

Sebagai negara yang otoriter, Tiongkok menggunakan diplomasi publik dengan sangat strategis untuk membangun citra yang positif dan mempengaruhi opini publik global ditengah isu krusial diskriminasi dan pelanggaran HAM terhadap kelompok muslim Uighur. Dalam hal ini, negara – negara otoriter seringkali menggunakan *soft power* seperti kebudayaan, pendidikan dan bantuan ekonomi sebagai sarana untuk mencapai tujuan diplomasi publik mereka. Selain itu, mereka juga menggunakan media massa dan platform digital lainnya untuk menyebarluaskan pesan menguntungkan dengan kontrol yang ketat. Oleh karena itu, dengan penggunaan media massa, Tiongkok menjangkau seluruh masyarakat internasional untuk menggambarkan kondisi dan keadaan muslim di Tiongkok.

Hal ini menciptakan pandangan bahwa Tiongkok ingin mengkomunikasikan pesan positif kepada masyarakat dunia tentang kehidupan umat muslim di negara tersebut. Media massa yang dimaksudkan adalah salah satunya *Xinhua News Agency* yang tidak hanya berfokus pada penyiaran dan penyebaran pesan dan berita, tetapi juga menyelenggarakan beberapa event berskala internasional yang berfokus pada perubahan sudut pandang masyarakat internasional yang lebih mendukung dan positif terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, utamanya dalam hal kehidupan umat muslim Uighur di Xinjiang.

C. Literature Review

Berbagai penelitian dengan analisis topik pembahasan mengenai media massa diplomasi publik, khususnya *Xinhua News Agency* dan Muslim Uighur telah banyak ditemukan sebagai topik yang penting untuk dikaji mendalam. Salah satu diantaranya yakni penelitian oleh Muhammad Firdaus Syadzii (2024) dalam judul penelitian “Dampak Terorisme dan Peran Media Dalam Propaganda Islamofobia”. Penelitian ini membahas perkembangan islamophobia di berbagai negara, termasuk Tiongkok dengan isu terorisme dan pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur sebagai etnis minoritas. Penyebarluasan isu tersebut dikaitkan dengan peran media massa yang memiliki jangkauan luas sehingga angka islamophobia semakin meningkat.

Dalam pemberitaan ini menggambarkan sisi media massa yang berfungsi membawa penyiaran islamofobi terhadap isu muslim Tiongkok sehingga letak

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lebih berfokus pada fungsi media massa untuk mendukung kebijakan Tiongkok yang mengandung informasi positif terhadap kebijakannya sekaligus menentang isu islamofobia yang dilakukan oleh Tiongkok.

Penelitian lainnya oleh Maria Krista Elen Klara Tahu pada tahun 2023 dengan judul “Strategi Media Internasional China Dalam Menyikapi Media Propaganda Barat Mengenai Etnis Uighur di Xinjiang”. Dalam penelitian mengemukakan kebijakan kontra terorisme dan kamp interniran Tiongkok yang mencuat berbagai propaganda internasional. Dengan menggunakan beberapa media massa seperti *Global Times*, *China Daily*, *China Central Television (CCT)* dan *China Global Television Network (CGTN)* sebagai media propaganda, Tiongkok melakukan disinformasi untuk melawan propaganda media barat.

Sehingga yang membedakan penelitian ini dengan penelitian diatas ialah berfokus pada peran dan dampak *Xinhua News Agency* terhadap kebijakan Tiongkok, termasuk terorisme dan kamp interniran sebagai media perbaikan citra Tiongkok. Selain peranan *Xinhua News Agency*, dalam penelitian ini juga dijelaskan mengenai dampak dari penyiaran *Xinhua News Agency* sebagai International Broadcasting sebagai salah satu metode pelaksanaan diplomasi public oleh pemerintah Tiongkok.

Sedangkan dalam penelitian yang berjudul “Expansion of Chinese State Media in Europe and Its Impact on Chinese media Discourse on Europe: The Case of Xinhua News Agency” oleh Chun Gan (2021) berfokus menganalisis

ekspansi dari penyiaran Xinhua News Agency oleh pemerintahan Tiongkok di seluruh dunia, khususnya di Eropa. Sebanyak 43 kantor Xinhua News Agency di seluruh daratan eropa sekaligus terbanyak diantara kawasan-kawasan lainnya yang memiliki hubungan kerjasama dengan Xinhua News Agency.

Selain itu, Xinhua News Agency juga menyiarkan berbagai informasi pendukung yang tidak hanya berfokus pada Tiongkok tetapi juga informasi di seluruh dunia, salah satunya yakni isu kepercayaan dan agama. Karena itu, persamaan dari penelitian ini adalah membahas penyebaran kantor cabang *Xinhua News Agency* sekaligus membahas pengaruh pemberitaan Tiongkok di Eropa. Namun tidak spesifik membahas secara khusus tentang isu muslim Uighur sehingga menjadikannya letak perbedaan terhadap penelitian yang dikaji oleh penulis.

Penelitian yang berfokus pada peranan Xinhua dengan pengangkatan isu lainnya dapat dilihat dalam judul “Konstruksi Media Online Mengenai Pemberitaan Blame Game Terkait Asal Mula Munculnya Virus Corona, Analisis Framing pada *Newyorktimes.com* dan *Xinhua.com*” oleh dengan judul oleh Muhammad Yudistira Meydianto dan Ahmad Toni tahun 2020. Penelitian ini berfokus menganalisis pernyataan Tiongkok yang menolak tuduhan oleh Trum dengan tuduhan bahwa Covid-19 dengan sengaja diciptakan oleh Tiongkok melalui media *Newyorktimes.com*. Karena itu, sebagai bentuk respon melalui *Xinhua.com*, Tiongkok memberikan pertentangan terhadap stigma Amerika Serikat yang menyebut covid-19 sebagai Virus China.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan terhadap penelitian penulis terkait peranan media massa *Xinhua News Agency*, tetapi letak perbedaannya adalah dari letak sudut pengambilan isu yang dianalisis dimana dalam penelitian yang ditulis oleh penulis berfokus pada isu kehidupan muslim Uighur di Tiongkok sedangkan pada penelitian diatas berfokus pada peranan *Xinhua News Agency* untuk merespon stigma dari pemberitaan Amerika Serikat.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh oleh Prita Indriani Sugiarti (2019) dengan judul “Pengaruh konstruksi Berita Media Online Xinhua Terhadap Eskalasi Konflik Laut China Selatan Tahun 2016-2017”. Hasil penelitian membahas konstruksi dari pemberitaan media Xinhua News Agency dalam mempengaruhi eskalasi konflik Laut China Selatan melalui penyajian berita dengan menggunakan kalimat-kalimat yang lebih menonjolkan arti konstruksi dengan tidak hanya diberitakan pada lingkup local tetapi juga didistribusikan ke berbagai negara yang memiliki hubungan dengan Tiongkok.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan terhadap penelitian sebelumnya dan penelitian bagi penulis yang juga berfokus pada penggunaan Xinhua News Agency oleh pemerintan Tiongkok merespon konflik lainnya dan hal itu pula yang menjadi letak perbedaan dimana dalam penelitian oleh yang ditulis oleh penulis lebih mengkaji mengenai isu kehidupan muslim Uighur di Tiongkok dengan menggunakan Xinhua sebagai media pemberitaan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Dinamika Kehidupan Umat Muslim di Tiongkok

Pengelompokan umat muslim secara garis besar di Tiongkok terdiri atas tiga kebangsaan umum yakni Turki yang meliputi orang Uyghur, Kirghiz dan Kazakh, Uzbekistan dan masyarakat percampuran antar bangsa Salar dan Hicu (Rusdan, 2017: 162). Berdasarkan data *Council of Foreign Relations*, jumlah entitas muslim di Tiongkok mengalami peningkatan pesat yang sebelumnya 22 juta jiwa pada tahun 2020 menjadi 28 juta jiwa di 2023 dengan proporsi etnis Hui dan kelompok Uighur terbanyak (Fakhriansyah, 2023). Proporsi jumlah penduduk muslim di Tiongkok mengalami peningkatan sebesar 1,8% dari total penduduk Tiongkok. Sekitar 93% dari total jumlah penduduk negara tersebut di dominasi oleh etnis mayoritas kelompok Han. Sedangkan etnis muslim terbesar di Tiongkok di dominasi oleh Etnis Hui di Ningxia, wilayah Barat Tiongkok yang mayoritas di terdiri atas kelompok Uighur sebanyak 11 juta penduduk di daerah otonomi Tiongkok, Xinjiang (Fakhriansyah, 2023).

Meskipun merupakan penduduk mayoritas, masyarakat etnis Uighur di Xinjiang seringkali menjadi sorotan dunia, utamanya dengan adanya laporan dari *Uyghur Hjelp* di Norwegia dan *Human rights Watch* terkait dokumen berjumlah ratusan laporan desa dan masyarakat etnis Uighur telah terganti nama akibat pihak pemerintah yang dinilai untuk menghilangkan pengaruh masyarakat etnis Uighur. Etnis Uighur merupakan kelompok etnis Turki yang sebagai besar bertempat tinggal di Xinjiang. Meski demikian, etnis Uighur

nyatanya memiliki ketidakharmonisan hubungan dengan Beijing sejak lama. Ada sekitar 12 juta etnis Uighur di Xinjiang dan sebagian besar merupakan beragama muslim. Menurut Richard N Frye dengan bukunya “*The Heritage of Central Asia: From Antiquity to the Turkish Expansion (1996)*” menyatakan bahwa nenek moyang dari orang Uighur berasal dari suku-suku konfederasi Tiele yang tercatat dalam sejarah Tiongkok abad ke-4 Masehi. Komunitas tersebut membentuk konfederasi dengan nama *Khaganat Goktore* pada abad ke-6 Masehi (Patnistik, 2024).

Konfederasi tersebut kemudian menjadi sangat besar di Asia Tengah akibat dorongan politik yang pada akhirnya terpecah-pecah membentuk berbagai suku, salah satunya bangsa etnis Uighur. Orang-orang Uighur yang dalam kesehariannya menggunakan bahasa Turkiye secara tradisional diakui sebagai etnis dominan di Xinjiang atau “Perbatasan Baru”. Wilayah Xinjiang kemudian dipegang oleh Beijing di abad ke-19 sejak Dinasti Qing memerintah. Kini, masyarakat Uighur telah beragama Islam sejak ajaran tersebut masuk ke Xinjiang. Islam kemudian menjadi bagian integral dan identitas serta budaya yang mempengaruhi kehidupan sosial, hukum dan tradisi etnis Uighur. Namun saat memasuki abad ke-20 ditengah pergolakan politik dan sistem pemerintahan Tiongkok, masyarakat Uighur menghadapi berbagai tantangan baru. wilayah Xinjiang mulai tidak stabil secara ekonomi dan politik.

Masyarakat Uighur mulai melakukan penuntutan yang lebih strategis terhadap daerah otonom dan hak terkait kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Tiongkok. Pada tahun 1949, berdirinya pemerintahan Republik

Rakyat China, otonom Xinjiang menjadi bagian resmi dari wilayah otonom Tiongkok. Akibatnya pemerintahan Tiongkok mengembangkan penerapan kebijakan asimilasi dan integrasi secara menyeluruh guna mengurangi identitas Uighur. Kebijakan tersebut berupa mengirimkan warga etnis Han dalam Xinjiang, perombakan infrastruktur serta perubahan sistem pendidikan yang mulai mengurangi penggunaan bahasa Uighur dengan bahasa Mandarin (Patnistik, 2024). Sinisasi agama, sebagai salah satu program yang dikembangkan oleh pemerintah Tiongkok juga menjadi salah satu isu konflik bagi masyarakat Uighur.

Perkembangan populasi muslim di Tiongkok yang meningkat secara signifikan menjadi sorotan masyarakat internasional, terutama dengan adanya kebijakan sinisasi agama yang intensif. Dalam hal ini, sinisasi agama merupakan program pemerintah Tiongkok untuk memastikan secara nyata bahwa keseluruhan agama yang dianut di negara tersebut di sesuaikan dengan ideologi Partai Komunis China. Kebijakan tersebut bertujuan untuk bisa mengintegrasikan agama di Tiongkok untuk masuk dan menjadi bagian dari ideologi negara sehingga bisa mengontrol praktik keagamaan. Adapun kebijakan tersebut di terapkan kepada keseluruhan agama yang meliputi Islam, Kristen, Budha, Hindu dan agama lainnya yang berfungsi untuk membatasi pengaruh dari adanya agama asing (Patnistik, 2024).

Sejak tahun 2015, kebijakan sinisasi agama telah dipergunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik keagamaan, utamanya di wilayah Xinjing yang merupakan wilayah yang

sangat penting bagi Tiongkok karena memiliki letak strategis dan sumber daya yang melimpah. Wilayah Xinjiang juga berada tepat di Jalur Sutra Modern dan berbatasan langsung dengan beberapa negara di Asia Tengah. Xinjing yang dinilai strategis sebagai bagian kawasan inisiatif *Belt and Road Initiative* (BRI) menjadikan salah satu kawasan yang berfungsi untuk meningkatkan hubungan perdagangan internasional. Letak geografis Xinjiang juga melimpah akan SDA seperti gas alam dan minyak bumi sebagai kebutuhan penting bagi pemerintah pusat. Namun sinisasi tersebut justru menimbulkan ancaman bagi penduduknya yang mayoritas merupakan penduduk etnis Uighur sehingga menimbulkan konflik perlawanan antara etnis muslim Uighur dan Pemerintah Tiongkok (Hazy, 2024: 297-298).

Kebijakan sinisasi Agama merupakan kebijakan yang diterapkan sejak terpilihnya Xi Jinping pada tahun 2015 sebagai presiden Tiongkok. Pada forum pertemuan “Kerja Nasional 2015 tentang Agama” yang diselenggarakan oleh Departemen *Front* Bersatu. Kemudian di tahun 2016 pada Konferensi Keagamaan Tahunan yang diketuai secara langsung oleh Xi Jinping membahas mengenai pentingnya teori Agama sosialis untuk mencirikan Tiongkok. Sehingga pembentukan kebijakan sinisasi agama dimaksudkan bertujuan untuk membentuk Tiongkok yang telah memasuki era baru sehingga luas cakupannya meliputi keseluruhan agama di Tiongkok seperti Kristen, Islam dan Buddha. Sejak peresmian sinisasi agama tersebut, Xinjiang sebagai salah satu wilayah dengan proporsi penduduk muslim terbesar di Tiongkok mengalami dampak perubahan yang signifikan. Kebijakan ini dinilai bagi masyarakat etnis Uighur

sebagai bentuk penindasan yang sistematis, seperti masyarakat etnis Uighur di paksa dan diharuskan mempelajari bahasa mandarin, propaganda PKC dan pelarangan berbicara Uighur serta menjalankan ibadah (Hazya, 2024: 300).

Dampak lainnya adalah penutupan, menghancurkan, menonaktifkan dan mengubah hiasan dari arsitek masjid seperti penghapusan menara kubah masjid untuk lebih identik dengan Tiongkok. Hal tersebut dinilai sangat bertentangan karena pengubahan struktur masjid dan kuil/klenteng masyarakat Tiongkok hampir sama sehingga sulit untuk dibedakan. Tindakan lainnya oleh pemerintah Tiongkok dalam kebijakan ini adalah pengawasan yang sangat ketat guna untuk membatasi adanya praktik keagamaan hingga untuk memantau hal tersebut, pemerintah Tiongkok memasang berbagai CCTV untuk mengawasi gerak gerak umat muslim. Sedangkan untuk anak-anak usia dini hingga dibawah umur 18 tahun dibuatkan aturan khusus untuk tidak diperbolehkan ke masjid dan mengikuti pendidikan agama. Tujuannya adalah untuk memutus hubungan antara generasi muda dengan agama mereka dengan praktik pencegahan agama di usia dini (Hazya, 2024: 301-302).

Dampak akibat dari kebijakan sinisasi agama oleh pemerintah Tiongkok lalu dinilai sebagai tindakan genosida yang secara jelas melanggar hak asasi manusia. Meskipun demikian, pemerintah Tiongkok tetap memberlakukan tanpa adanya perubahan dari peringatan yang berulang kali di sampaikan oleh *Human Rights* dan lembaga kemanusiaan lainnya. Bahkan pemerintah Tiongkok telah memberlakukan revisi undang-undang dengan pasal ketat dimana pemerintah Tiongkok semakin memperketat kontrol keagamaan yang

telah diberlakukan sejak September 2023 lalu. Dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa setiap pengurus tempat-tempat ibadah diharuskan terdapat anggota PKC. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya ekstremisme sekaligus untuk mendapatkan dukungan dan perhatian penuh dari penduduk Han. Dengan demikian, pemerintah Tiongkok bisa mempertahankan dominasi ideologi dan untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional Tiongkok.

Ketegangan akibat dampak kebijakan sinisasi agama merupakan salah satu dari berbagai kerusuhan lainnya yang dialami masyarakat etnis Uighur di Xinjiang. Sebelumnya juga telah terjadi berbagai konflik yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok seperti peningkatan statistik demografi penduduk di Xinjiang karena adanya peningkatan jumlah imigrasi oleh penduduk Han yang merupakan kebijakan pemerintah Tiongkok. Akibatnya terjadi reformasi ekonomi karena adanya keinginan untuk memasukkan Xinjiang sebagai bagian dari RRC sehingga menyeluruh memasukkan suku besar Han melalui imigrasi. Kebijakan tersebut tentunya menimbulkan bentrokan besar terhadap masyarakat etnis Uighur yang dianggap bisa mengancam dan menghilangkan identitas akibat adanya asimilasi. Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya ketimpangan sosial ekonomi dimana etnis Han lebih mendominasi pekerjaan di sektor ekonomi dan pekerjaan formal sedangkan etnis Uighur kebanyakan bekerja di sektor informal bahkan mengalami pengangguran tinggi (Wu & Song, 2014 dalam Hayza, 2024: 301)).

Hal tersebut diberlakukan sejak terjadinya peristiwa insiden pengeboman tahun 2014. Akibatnya pemerintah Tiongkok melakukan pengawasan ketat terhadap penduduk muslim. Guna untuk mengantisipasi kejadian berulang, Presiden Xi Jinping mengeluarkan program “Serang Keras Melawan Terorisme” di tahun 2014. Dalam kampanyenya, penduduk muslim Uighur serta kelompok minoritas lainnya dipaksa untuk masuk kedalam kamp pengasingan yang merupakan pusat memerangi ekstermisme. Bagi mereka yang telah masuk ke dalam kamp tersebut akan diasimilasi secara paksa untuk masuk dan menjadi bagian dari masyarakat etnis Han (Hazyra, 2024: 301). Perjuangan melawan terorisme berpegang teguh pada prinsip supremasi hukum dengan undang-undang yang menaungi kebijakan kontra terorisme yang terdiri atas Undang-Undang Penanggulangan Terorisme Republik Rakyat Tiongkok, Tindakan Daerah Otonomi Uighur Xinjiang tentang deradikalisasi serta aturan lainnya yang berpusat pada pendidikan dan kejuruan di Xinjiang (Tahu, 2023: 218).

Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan kebijakan dari undang-undang tersebut dibentuklah pendirian Kamp Interniran, sebuah kamp pendidikan ulang bagi masyarakat yang dinilai telah terpengaruh paham radikal. Kebijakan tersebut nyatanya ditujukan hanya pada penduduk Xinjiang yang memiliki catatan kriminal dan berpotensi untuk menjadi teroris serta berperilaku berbahaya bagi sesama penduduk Xinjiang. Sehingga untuk memastikan hal tersebut, terdapat tiga golongan yang ada dalam kamp tersebut selama kebijakan berlangsung yakni golongan pertama merupakan orang yang

dihasut, dibujuk hingga dipaksa keikutsertaannya di dalam kegiatan teroris, atau bahkan bagi orang-orang dengan kesanggupan kecil untuk ikut dalam berbagai tindakan ekstremis dalam kapasitas akibat yang kecil sehingga tidak dikategorikan sebagai kejahatan. Golongan kedua yakni mereka yang dipaksa untuk ikut serta dalam kegiatan teroris atau orang-orang dengan kerelaan untuk melakukan tindakan teroris dengan bahaya sedang.

Dalam kamp ini, orang-orang yang telah melakukan tindakan kejahatan dan dengan kesadaran penuh mengakui kesalahan akan diberikan pengampunan tanpa penjatuhan hukuman dengan syarat bersedia untuk mengikuti berbagai pelatihan yang ditunjukkan oleh pemerintah Tiongkok. Golongan ketiga adalah penduduk Uighur yang secara nyata mendapatkan vonis hukuman penjara dengan dalih hukuman atas tindak kejahatan terorisme. Meskipun telah mendapatkan hukumannya, mereka tetap akan dinilai mengancam masyarakat sehingga harus mengikuti pendidikan di kamp sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Pada dasarnya, kamp tersebut dengan ketiga kategorinya diberlakukan merata secara individu tanpa memandang etnis dan suku yang mengindikasikan bukan hanya etnis Uighur tetapi juga etnis muslim Turki lainnya. Namun karena jumlah yang etnis Uighur mendominasi di kamp tersebut maka banyak penduduk etnis Uighur yang terindikasi di tiga kategori tersebut (Tahu, 2023: 219).

Pemerintah Tiongkok melalui kamp tersebut memberikan pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat seperti pendidikan bahasa mandarin dan juga penyediaan layanan berkualitas lainnya seperti *e-commerce*, perawatan dan

perbaikan, pengelolaan makanan dan jasa rumah tangga. Meski demikian, pendirian Kamp Interniran tersebut dinilai menjadi sebuah ancaman yang memenjarakan serta mendiskriminasi masyarakat etnis Uighur. Berbagai media barat mengindikasikan sebagai bentuk pembatasan ruang bebas masyarakat etnis Uighur serta tindakan pelanggaran bebas beragama karena masyarakat etnis Uighur yang beragama islam diberikan pembelajaran paham komunis (Tahu, 2023: 219). Dari hal tersebut, Kehidupan muslim Uighur mengalami perubahan signifikan secara besar jika dibandingkan dengan masa pemerintahan dinasti Tang yang dinilai lebih toleransi dan agama diterima dengan sangat baik di Tiongkok.

Oleh karena itu, beberapa kebijakan yang dilaksanakan Tiongkok bagi etnis minoritas Uighur di Xinjiang dinilai positif oleh beberapa pihak namun bagi masyarakat internasional justru menganggapnya sebagai bentuk diskriminasi dan intimidasi, terlebih lagi isu terhadap pelanggaran HAM cukup krusial di beberapa negara. Karenanya bagi pemerintah Tiongkok, kebijakan yang dilakukan tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa terlalu memperdulikan stigma dari media-media barat dan PBB.

B. Kantor Berita Cina (*Xinhua News Agency*)

Sebagai negara besar, Tiongkok memiliki beberapa media massa terbesar dengan jangkauan hampir seluruh dunia. Media massa tersebut antara lain *Xinhua News Agency*, *China Daily* dan *China Global Television Network* (CGTN). Ketiga media massa tersebut memiliki peran dan tugas masing-masing terkait pemberitaan pemerintahan Tiongkok. *Xinhua News Agency* lebih berfokus untuk mempublikasikan berbagai kebijakan resmi pemerintahan Tiongkok.

Selain itu juga melakukan promosi program yang diselenggarakan oleh Tiongkok, serta meliput hal umum lainnya seperti bisnis, teknologi, budaya, *life style*, Tiongkok hingga dunia. *Xinhua News Agency* bahkan mengelola situs khusus BRI (*Belt and Road Initiative*) (*Asia Society Policy Institute*, 2022). Pada 1931, Xinhua bernama dengan “*The Red China News Agency*” yang kemudian berganti nama sebagai *Xinhua News Agency* di 1937.

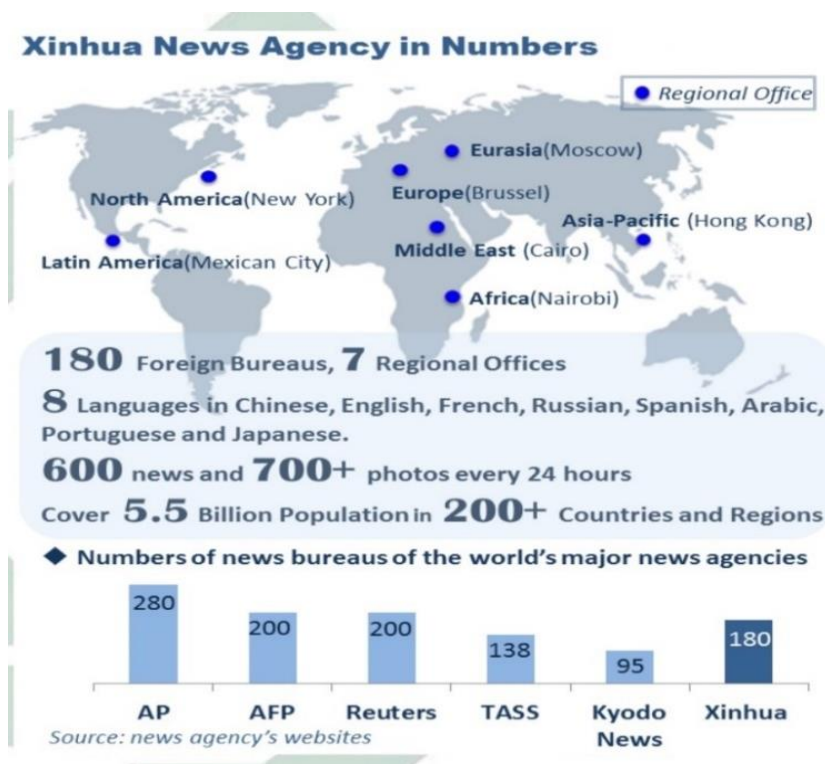
Berbeda dengan media pemberitaan pemerintah Tiongkok lainnya, *Xinhua News Agency* berada langsung dibawah kebijakan partai PKC dan berfokus pada kebijakan Tiongkok, khususnya BRI (*Belt and Road Initiative*). *Xinhua News Agency* diharapkan untuk bisa menjembatani kepentingan antara partai, pemerintah dan masyarakat Tiongkok yang dalam hal ini *Xinhua News Agency* sebagai media komunikasi untuk menampung seluruh tuntutan rakyat dan kebijakan partai terhadap pemerintah Tiongkok.

Penyiaran pemberitaan *Xinhua News Agency* tidak hanya sebatas dalam negeri, tetapi menjangkau hingga ke berbagai negeri di dunia setelah perang

pasifik berakhir. Karena dengan jangkauan yang luas, *Xinhua News Agency* mulai mendirikan berbagai kantor cabang di negara lain dengan tujuan untuk menyampaikan berita-berita dengan menggunakan bahasa mewakili negara tersebut (Sugiarti, 2019: 55).

Perkembangan penyiaran itu menjadikan media *Xinhua News Agency* merupakan lembaga representasi Tiongkok dan negara lainnya tanpa memiliki perwakilan diplomatik di bidang khusus media. Selain itu, *Xinhua News Agency* juga memiliki tingkatan yang lebih tinggi di bandingkan media lainnya seperti *People's Daily*, dimana pemberitaan yang disampaikan oleh *People's Daily* diteruskan atau dikutip dari berita yang disampaikan *Xinhua News Agency*.

Xinhua News Agency telah mengontrol sebanyak 180 biro yang bertempat di berbagai belahan dunia. Terdapat 7 kantor berstandar regional media *Xinhua News Agency* yang didirikan di New York, Brussel, Mexico, Kairo, Moscow, Hongkong dan Nairibo serta sebanyak 31 biro yang terletak di Tiongkok dengan tiap 1 media untuk provinsi, daerah otonomi serta madya umum di kelola secara langsung oleh biro kemiliteran (Sugiarti, 2019: 56).



Gambar 3.1 Penyebaran Biro *Xinhua News Agency*

Sumber: *World Economic Forum*

Berdasarkan pada gambar diatas, *Xinhua News Agency* menjadi salah satu pusat pemberitaan di lingkup internasional dengan ruang penyebarannya yang luas hingga mencakup tujuh kantor regional resmi melalui jejaring kerjasama 180 pemberitaan biro asing di seluruh benua. Pemberitaan yang di sampaikan juga menggunakan berbagai bahasa asing di beberapa negara untuk mendukung pemahaman masyarakat internasional yang meliputi 8 bahasa utama yakni Mandarin, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, Arab, Portugal dan Jepang. Eksistensi pemberitaan *Xinhua News Agency* yang di tayangkan selama 24 jam dengan ratusan foto dan cover setiap harinya di lihat hampir 5,5

populasi di 120 negara. Hal tersebut menunjukkan pengaruh yang kuat dari penyiaran *Xinhua News Agency* sebagai media diplomasi publik Tiongkok.

Dengan demikian, *Xinhua News Agency* menjadi media pemberitaan satu-satunya yang dipercaya untuk mendistribusikan pemberitaan yang dianggap penting, utamanya yang berkaitan dengan Partai Komunis dan pemerintah pusat Tiongkok, bahkan direktur utama *Xinhua News Agency*, yakni Presiden Li Congjun juga merupakan anggota dari Komite Sentral oleh Partai Komunis Tiongkok.

Sehingga secara langsung menjadikan *Xinhua News Agency* sebagai *outlet pers* dari seluruh kebijakan dan kepentingan Partai Komunis Cina. Dikarenakan sebagai media pemberitaan utama partai, kantor pusat *Xinhua News Agency* juga terletak di Beijing dimana letaknya dianggap strategi karena berdekatan dengan wilayah Zhongnanhai, tempat sekaligus markas Partai Komunis Cina, Kantor Presiden Republik Rakyat Cina dan Dewan Negara (Sugiarti, 2019: 56-57).

Dalam penyiaran untuk setiap harinya, sekitar 2700 jam program (Jayarathne, 2023). Dengan menggunakan 65 bahasa dalam pelaporan internasionalnya seperti bahasa Inggris, Jepang, Spanyol, Rusia, Portugis, Perancis, dan Arab. Kemudian, mayoritas wilayah dunia dijangkau lebih dari 50 pemancar gelombang pendek, yang disiarkan melalui *internet* dan beberapa satelit. Siaran Kantor Berita China (*Xinhua News Agency*) diputar ulang di banyak stasiun radio FM dan AM lokal di seluruh dunia (Jayarathne, 2023).

Dengan demikian, sebagai negara aktif yang menggunakan diplomasi publik, Tiongkok melalui *Xinhua News Agency* menjadi cara strategis secara transparan yang bisa tersampaikan ke berbagai negara termasuk isu dan hal umum lainnya terkait Tiongkok (Nurhud, 2019). Banyak bidang yang ditelusuri dan diberikan oleh *Xinhua News Agency* yang secara umum dilakukan oleh Tiongkok, isu krusial di belahan dunia, serta faktor eksternal dan internal berupa Kesehatan, teknologi, politik, olahraga, bisnis, *entertainment* hingga mancanegara.

Keseluruhan informasi tersebut dapat dilihat pada masing-masing negara yang memiliki hubungan kerjasama dengan *Xinhua News Agency*, seperti Biro *Xinhua News Agency* di Rusia dan Spanyol. Informasi dan berita yang ditampilkan up to date dengan berbagai peristiwa dan kejadian di Tiongkok baik berupa kebudayaan, traveling hingga festival kebudayaan tahunan.

Namun karena berpusat di Rusia dan Spanyol, maka selain pemberitaan mengenai Tiongkok juga menyiarkan informasi umum mengenai Rusia dan Spanyol bahkan saat peristiwa konflik Rusia – Ukraina, *Xinhua News Agency* turut andil menulis dan menyebarkanluaskannya dengan beberapa dukungan juga ditunjukkan dengan pada setiap pemberitaannya. Selain itu, Biro *Xinhua News Agency* juga sangat aktif mendukung kolaborasi hingga tingkat pemerintahan dimana Presiden Rusia, Vladimir Putin juga melakukan wawancara langsung dengan pihak *Xinhua News Agency*.



Малайзийцы со слезами на глазах попрощались с парой больших панд Синсин и Лянлян

Китай является важным стратегическим рынком для грузинского вина -- Национальное агентство вина Грузии

Не менее 14 мирных жителей погибли на западе Судане в результате обстрела со стороны Сил быстрого реагирования

Sponsored by Xinhua News Agency. Copyright © 2000-2025 XINHUANET.com All rights reserved.

Gambar 3.2 Biro *Xinhua News Agency* di Rusia

Sumber: <https://russian.news.cn>

Gambar di atas menunjukkan profil Biro *Xinhua News Agency* yang ada di Rusia. Dalam hal ini, *Xinhua News Agency* tidak hanya menyiarkan pemberitaan tentang kebijakan, seni dan tradisi Tiongkok saja, tetapi juga berbagai pemberitaan yang terjadi di Rusia. Pembentukan biro Pemberitaan *Xinhua News Agency* Rusia menunjukkan bentuk kerjasama antara pemerintah Tiongkok dan Rusia dalam bidang pemberitaan sehingga dalam pemberitaannya cenderung membahas berbagai aktifitas, program dan kebijakan kedua negara, bahkan isu dan konflik di sajikan secara terbuka. Selain itu, penyiaran berita yang di lakukan sekaligus sebagai bentuk pertukaran kebudayaan dan gaya hidup kedua negara dimana kebudayaan, bisnis dan gaya hidup seringkali di soroti sebagai pemberitaan utama.



Gambar 3.3 Biro *Xinhua News Agency* di Spanyol

Sumber: <https://spanish.news.cn>

Pemberitaan yang sama juga dilakukan oleh Biro *Xinhua News Agency* Spanyol seperti gambar di atas. Beberapa perilsan berita yang disampaikan mencakup pertandingan liga, daily lifestyle, kebencanaan alam hingga tanggapan pemerintah Spanyol terkait isu konflik di Gaza dan realisasi hubungan kerjasama dengan negara lain. Karena itu, meski *Xinhua News Agency* memiliki banyak kantor cabang di berbagai negara, namun fokus pemberitaannya akan selalu mengarah kepada informasi umum Tiongkok dan peristiwa yang terjadi di sana. Sedangkan sisi lainnya menyebarluaskan informasi penting tentang negara yang menjalin kerjasama dengan *Xinhua News Agency* seperti di Rusia dan Spanyol.

Dengan prospek pemberitaan yang luas, *Xinhua News Agency* juga menekankan visi pemberitaan yang aktual. Sesuai penjelasan oleh *website Xinhua News Media Holdings Limited*, *Xinhua News Agency* memiliki 5 point visi, yakni :

1. Informasi kami adalah kompetensi Anda, pentingnya komunikasi instan serta waktu informasi yang nyata.
2. Menyampaikan berita secara langsung dalam sepanjang waktu, jurnalis dan editor handal senantiasa menangkap berbagai momen yang layak untuk diketahui khalayak umum dikarenakan bagi Anda setiap momen adalah peluang untuk menjadi kaya.
3. Menjangkau seluruh dunia untuk membantu Anda, memiliki jaringan dengan jangkauan yang luas dan dinamis, berdiri paling terdepan untuk menciptakan peluang pasar agar bisa melampaui harapan Anda.
4. Setiap berita yang kami tampilkan memiliki potensi, tugas kami untuk mengeksplorasi, menyelidiki dan mengungkap dikarenakan setiap orang memiliki keunikan. Kami tidak pernah menyerah pada setiap peluang untuk tampil berbeda.
5. Jaringan yang menghubungkan para pemimpin global di dunia, profesionalisme pada pengambilan setiap keputusan di dunia melalui wawancara tingkat tinggi dengan analisme yang tajam serta pelopor pasar untuk memandu jalan Anda (Xinhua News Medis Holdings Limited, 2018).

Pada awalnya, *Xinhua News Agency* melakukan pemberitaan hanya dengan berupa gambar dan teks. Namun dengan melakukan perkembangan pada perubahan sistem, *Xinhua News Agency* mulai meluncurkan pemberitaannya dengan berupa video. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memberikan inovasi yang bertujuan untuk mempengaruhi opini dan pola pikir secara mengglobal guna menarik keuntungan negara.

Kemudian di tahun 2009, *Xinhua News Agency* membuat inovasi lainnya berupa *launching* saluran televisi untuk pertama kalinya dalam bahasa mandarin dan inggris hingga pada akhirnya menggunakan satelit dengan berbagai macam bahasa. *Xinhua News Agency* juga membentuk pemecahan divisi yang meliputi *China Telecom*, *China Mobile*, *China Unicom*, Chanel keuangan dan CFC. Selain itu, berbagai bisnis layanan pada *Xinhua News Agency* juga melibatkan situs website yang menyebar luas ke bisnis periklanan berupa strategi media, perencanaan manajemen, pembentukan merk, dan pengoperasi iklan.

Penyebarluasan pemberitaan *Xinhua News Agency* menjadikannya sebagai media yang luas. Namun seperti halnya dengan media lainnya, *Xinhua News Agency* juga seringkali mengalami masalah, utamanya penyiaran televisi dan situs web. *Xinhua News Agency* didirikan dengan maksud sebagai landasan kantor berita paling diminati di dunia. Namun setelah ditinjau selama bertahun-tahun, staff pengelolah *Xinhua News Agency* mengalami berbagai bentuk saingan, khususnya di situs web berupa periklanan siaran sehingga berakibat

fatal dengan tidak kembalinya modal perusahaan yang berdampak buruk dengan menurunnya kinerja seluruh staff.

Kemudian wilayahnya diperluas termasuk ke Hong Kong dan daratan negara yang tergabung dalam *One Belt One Road Initiative*. Karena sebelumnya, Presiden Xi Jinping memprioritaskan potensi pengembangan secara ilmiah di daratan Hong Kong berupa fasilitas kerjasama di bidang teknologi dan menyokong sepenuhnya Hong Kong sebagai center pengembangan teknologi internasional dan inovasi. *Xinhua News Agency* di daratan Hong Kong merencanakan untuk membuat investasi yang selektif dibidang intelijen buatan, industri 5G dan telekomunikasi. Sedangkan *Xinhua News Agency* di daratan Tiongkok memimpin perencanaan yang di maksudkan oleh *Xinhua News Agency* di Hong Kong dengan berfokus menyampaikan berita melalui siaran televisi dan situs web sehingga *Xinhua News Agency* bukan hanya di maksudkan sebagai media penyiaran berita tetapi media berita global. Oleh karenanya, secara politik, *Xinhua News Agency* juga dipercaya sebagai bentuk identitas dan *representative* dari “Suara Tiongkok” (Sugiarti, 2019: 59-61).

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Peran Kantor Berita Cina (*Xinhua News Agency*) sebagai Aktor Diplomasi Publik terhadap Isu Muslim Tiongkok

Kebijakan Tiongkok terhadap masyarakat Uighur memberikan dampak yang buruk terhadap kebebasan dan kehidupan mereka seperti pembatasan belajar agama dan simbol-simbol ke-islaman (Fakhriansyah, 2023). Organisasi HAM, *Amnesty International* berdasarkan laporan yang ditulis pada 10 Juni 2021 menjelaskan bahwa pemerintah Tiongkok dengan terang-terangan telah melakukan tindak kejahatan terhadap hak hidup dan kebebasan kemanusiaan seperti penyiksaan, pengawasan, dan pelarangan terhadap kelompok Uighur dan minoritas muslim lainnya di Xinjiang. Beberapa bentuk pelanggaran HAM yang dimaksud meliputi kamp interniran massal, perlakuan tahanan diskriminatif, hukuman yang tidak fleksibel, pemblokiran informasi, program antiteror Tiongkok, dan pengawasan massal (Tempo, 2019).

Selain laporan *Amnesty International*, beberapa kelompok HAM di negara bagian Barat menganggap kebijakan Tiongkok berusaha melakukan aksi genosida terhadap warga Uighur, termasuk kelompok etnis Turki di Xinjiang (BBC News Indonesia, 2021). Berdasarkan laporan *Human Rights Watch*, pemerintah China bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Kebijakan kontra terorisme yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dalam program “Serang Keras Melawan Terorisme” di tahun 2014 dengan membentuk kamp interniran lebih banyak menyodot perhatian masyarakat

internasional, utamanya media-media barat dengan segala bentuk propaganda yang dibuat untuk menyudutkan Tiongkok dengan isu diskriminasi dan pelanggaran HAM penduduk etnis Uighur seperti *Al-Jazeera*, BBC dan *The New York Times*.

Berita-berita tersebut di sebarluaskan secara menyeluruh hingga berdampak domino terhadap media internasional lainnya dengan berbagai penilaian yang menyatakan bahwa kebijakan Tiongkok adalah untuk menekan kebebasan serta mendeskriminasi etnis Uighur di Xinjiang (Tahu, 2023: 216-217). Akibat propaganda yang diciptakan, Tiongkok mendapatkan berbagai kecaman internasional sekaligus desakan PBB terkait kebijakan kamp interniran. Karena itu, menanggapi isu tersebut, pemerintah Tiongkok mulai melakukan strategi untuk mengembalikan citra baiknya melalui diplomasi publik dengan menggunakan media-media internasional miliknya seperti *China Daily*, *China Global television Network (CGTN)*, *Global Times*, dan *China Central Television (CCT)*

Penggunaan diplomasi publik antara negara otoriter dan negara demokrasi cenderung bersifat bertolak belakang. Meskipun pada umumnya diplomasi publik digunakan untuk membangun citra positif negara, namun penggunaannya berbeda antara negara otoriter dan demokrasi. Dalam hal ini, diplomasi publik bagi negara demokrasi cenderung lebih terbuka dan transparan serta memiliki toleransi untuk menerima kritik dan saran yang bisa dengan mudah mendapatkan perhatian masyarakat. Sedangkan bagi negara otoriter, diplomasi publik memiliki kontrol yang lebih ketat serta tantangan

terhadap pembatasan kebebasan berbicara dan akses informasi. Oleh karena itu, narasi-narasi negara otoriter dikendalikan penuh oleh pemerintah guna mempromosikan citra positif negaranya di lingkup internasional.

Untuk meyakinkan publik internasional terkait kredibilitas pesan yang di sampaikan menjadi tantangan yang cukup berat dikarenakan adanya kekhawatiran transparansi dan HAM yang berbeda jauh dari negara demokrasi. Karena itu, negara otoriter cenderung menggunakan *soft power* berupa kebudayaan, pendidikan dan bantuan ekonomi. Namun diantara penggunaan soft power tersebut, penggunaan media massa baik untuk perilsan narasi global maupun sebagai penyelenggara event internasional memainkan peran penting dalam diplomasi publik bagi negara otoriter dengan menyebarkan pesan mendukung bagi kepentingan pemerintah dan negara untuk membangun citra positif sekaligus alat untuk menyuarakan kritik terhadap rezim tertentu. Karena itu, sebagai negara otoriter, Tiongkok cenderung menggunakan peran media massa sebagai media diplomasi publiknya.

Tiongkok menegaskan untuk memperkuat strategi penyiaran media agar publik lebih bisa melihat setiap peristiwa yang disampaikan dengan menggunakan dua sudut pandang berbeda agar bisa melihat kebenaran yang lebih proporsional (Tahu, 2023: 221-222). Keseluruhan media penyiaran Tiongkok dikerahkan secara sepenuhnya untuk berperan strategis dalam menyebarluaskan kondisi etnis muslim Uighur di Xinjiang sebagai bentuk diplomasi publik. Dalam hal ini, pemerintah Tiongkok berfokus pada dua upaya diplomasi publik untuk membentuk citra positifnya sekaligus

mendapatkan pengakuan positif dari masyarakat internasional yakni pembentukan narasi secara mengglobal terkait kondisi muslim di Uighur, baik di platform berita maupun media sosial dan mendatangkan secara langsung jurnalis-jurnalis media di Xinjiang, baik melalui undangan pendanaan penuh oleh Komisi Urusan Dunia Maya Xinjiang maupun penyelenggaraan KTT.

Dalam mengembangkan upaya-upaya tersebut, penekanan terhadap media-media *international broadcasting* miliknya dipergunakan sebagai sarana diplomasi publik yang mampu mencakup publik global secara menyeluruh. *Xinhua News Agency* yang merupakan pusat pemberitaan utama Tiongkok dengan penyebaran biro pemberitaan di berbagai negara di dunia memudahkan untuk *Xinhua News Agency* menyampaikan informasi secara langsung kepada negara-negara lainnya terkait kondisi sebenarnya muslim Uighur di Xinjiang. Dalam hal ini, *Xinhua News Agency* tidak hanya menggunakan kemampuan pemberitaannya untuk membentuk narasi-narasi positif tentang Tiongkok dan Xinjiang, tetapi juga turut langsung menginisiasi para jurnalis dan media yang ingin meliputi kondisi di Xinjiang.

1. Perilisan Narasi Global Positif

Berdasarkan laporan yang dipublikasikan *International Federation of Journalists* (IFJ) tahun 2020 menyatakan bahwa pemerintahan Tiongkok mulai mencoba untuk masuk ke dalam ekosistem pemberitaan global dengan menerapkan strategi canggih dan sistematis yang sepenuhnya ditunjukan untuk mengembalikan sekaligus menaikkan citra Tiongkok di panggung

internasional dengan menekankan pendistribusian berita narasi positif yang merespresentasikan keindahan di Tiongkok yang berbeda jauh dari yang isukan oleh media barat (Susilo, 2020). Dalam hal ini, *Xinhua News Agency* berperan strategis untuk memproyeksikan dan meningkatkan citra nasional Tiongkok dengan mendapatkan dan menyiarkan berbagai informasi penting yang berkaitan erat dengan isu muslim Uighur secara akurat.

Xinhua News Agency menyiarkan pemberitaan kondisi di Xinjiang dengan lebih berfokus pada kebijakan pemerintah Tiongkok yang dianggap terbuka dan strategis untuk membangun Xinjing secara proporsional untuk membentuk citra positif sehingga mampu membentuk propaganda yang bisa mendapatkan kepercayaan publik terhadap Tiongkok secara akurat berdasarkan pendapat dari dewan negara. Dalam mengelola citranya, Tiongkok menciptakan narasi-narasi yang lebih berfokus menampilkan pemerintahan Tiongkok yang lebih positif dibandingkan secara langsung menyerang propaganda media barat seperti wacana pembangunan, kebudayaan, dan terorisme. Narasi dan artikel yang dibuat tidak hanya di rilis dalam bentuk berita, tetapi *Xinhua News Agency* juga menargetkan penyebaran di platform media sosial dengan penggunaan yang jauh lebih strategis, salah satunya platform video Youtube.

Narasi-narasi tersebut di kembangkan menjadi tiga bagian utama, yakni mengintensifkan penyebaran secara kuantitatif untuk melawan krisis citra internasional yang tercipta akibat krisis di Xinjiang. Kedua, membentuk konten pesan yang jauh lebih variative dengan menghubungkan kebijakan yang dibentuk di Xinjiang dengan isu terorisme internasional sekaligus

menggunakannya untuk mengkritik standar ganda barat dengan menggunakan perspektif HAM sesuai standar Tiongkok. Ketiga, menggunakan metode perilisian yang inovatif untuk menghasilkan dampak yang tinggi. Dalam hal ini, CGTN dan CCTV yang berada di bawah naungan *Xinhua News Agency* telah lama mengadopsi metode perilisian narasi bergaya CNN, BBC dan Al-Jazeera sehingga mampu meningkatkan proporsi berita yang lebih tinggi.

Wacana yang dikembangkan dalam bentuk narasi terkait kondisi di Xinjiang meliputi berbagai aspek. Pertama, narasi pembangunan yang menggambarkan virtual dan kontruksi pembangunan di Xinjiang yang meliputi transformasi di ibu kota Xinjiang berupa infrastruktur jalan raya dan wilayah, pengentasan kemiskinan, pengembangan pariwisata, dan strategi relokasi yang diperuntukkan meningkatkan kehidupan masyarakat di Xinjiang dimana keseluruhan narasi tersebut menggambarkan Tiongkok sebagai negara yang mampu memicu proses dan perubahan masyarakat yang jauh lebih positif (Alpermaan dan Malzer, 2023:149).

Kedua, budaya dan sejarah yang dikaitkan dengan pembentukan kamp interniran (Alpermaan dan Malzer, 2023:155). Dalam hal ini, *Xinhua News Agency* meriliskan sebuah dokumen setebal 6.800 kata yang menjelaskan Xinjiang sebagai masyarakat beragam agama serta telah hidup berdampingan hingga berabad-abad lamanya dengan menghormati kebebasan warganya untuk percaya atau tidak dengan agama apapun itu. Dalam dokument tersebut juga, menjelaskan bahwa sejarah di wilayah Xinjiang pada umumnya telah terdistorsi oleh pasukan asing yang saling bermusuhan, separatis, teroris dan

esktremis agama sehingga peralihan Uighur ke islam bukan merupakan kesukarelaan yang dibuat oleh masyarakat tetapi keputusan akhir perang agama serta sikap pemaksaan mereka yang berkuasa.

Oleh karena itu, kampanye yang dimaksudkan oleh orang-orang Uighur sebagai sebuah penjara di jelaskan secara ulang oleh Dewan Negara melalui *Xinhua News Agency* bahwa pemerintah Tiongkok tidak pernah memiliki kamp pendidikan ulang di Xinjiang, tetapi melainkan kamp sebagai pusat pelatihan kejuruan dan bersifat sukarela. *Xinhua News Agency* juga menjelaskan dalam beritanya bahwa pemerintah Tiongkok membentuk kamp tersebut sebagai bagian penting program untuk memerangi radikalisme islam sesuai dengan laporan yang dirilis oleh *Xinhua News Agency* (Tempo, 2019). Narasi tersebut disampaikan oleh Dewan Negara Tiongkok bahwa kamp interniran sebagai pusat pelatihan kejuruan yang digunakan dalam menyelesaikan ekstremisme dan kemungkinan terorisme.

Ketiga, narasi terror dan penanggulangan kritik, utamanya yang dikaitkan dengan terorisme, separatism dan ekstremisme (Alpermaan dan Malzer, 2023:159). Dalam hal ini, narasi-narasi yang dibentuk lebih menunjukkan video dokumenter sebagai bentuk legitimasinya untuk menghilangkan terorisme, separatism dan ekstremisme sekaligus ditujukan untuk propaganda dan kebijakan luar negerinya. Dengan kata lain, kamp interniran yang dimaksudkan oleh media barat sebagai bentuk pelanggaran HAM adalah hal keliru yang di tujukan pada Tiongkok dan dinilai bahwa negara luar mulai ikut campur dalam urusan dalam negeri Tiongkok (Anwar, 2022). *Xinhua News*

Agency berperan mendapatkan pernyataan dan informasi resmi dari dewan negara guna untuk mendukung ketiga narasi tersebut yang kemudian menyiarkan sisi lain pemerintahan Tiongkok yang bersifat positif seperti kunjungan langsung pemerintah Tiongkok ke Xinjing.

Dalam foto yang dirilis oleh *Xinhua News Agency* menampilkan Presiden Tiongkok, Xi Jinping berkeliling menyapa penduduk di Xinjiang yang tengah dikerumungi oleh penduduk etnis Uighur dengan senyuman dan tepuk tangan. Dalam rilisan tersebut menampilkan secara jelas penduduk etnis Uighur yang mengenakan pakaian dan topi shalat muslim. Dengan kata lain, narasi-narasi oleh *Xinhua News Agency* menunjukan bahwa pemerintah Tiongkok peduli serta mendengarkan suara dan perhatian penduduknya, termasuk etnis Uighur di Xinjiang dengan menekankan persatuan. Narasi-narasi tersebut dirilis dalam bentuk video dokumenter dan foto yang dipublikasikan guna menampilkan citra positif Tiongkok sehingga hal tersebut tentunya akan bertolak belakang dengan pernyataan isu pelanggaran HAM (Pramudyani, 2022).

Akan tetapi, strategi yang digaungkan oleh pemerintah Tiongkok tetap mendapatkan respon krusial dari pihak-pihak tertentu. Salah satunya yakni pernyataan Komisi *Human Rights* PBB yang di lansir melalui Al-Jazeera pada tahun 2018 menyatakan bahwa Tiongkok hanya mencoba menutupi kebijakan kontroversialnya yang telah dianggap menahan sebanyak dua juta penduduk muslim Uighur serta minoritas lainnya di Xinjiang di jaringan pusat pendidikan ulang sebagai sebuah pendidikan kejuruan. Selain itu, pernyataan Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet, yang pernah melakukan kunjungan ke

kamp di Xinjiang pada tahun 2022 yang menegaskan bahwa Tiongkok telah melanggar HAM dengan serius (SindoNews, 2024).

Selain pernyataan Komisi PBB, Amerika Serikat juga tidak henti-hentinya mengiring stigma negatif terkait dugaan pelanggaran HAM etnis Uighur. Melalui media-media barat, Amerika Serikat dinilai telah melakukan propaganda yang tidak berdasar sehingga melalui konferensi pers. Di lansir dari laman pemberitaan Al Jazeera tahun 2021, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menyatakan kecamannya bahwa Tiongkok harus menyelesaikan penuh keseluruhan pelanggaran HAM yang dilakukan secara sengaja, utamanya bagi etnis minoritas Uighur yang ada dalam Xinjiang bagian barat. Guna untuk mendukung pernyataannya, Presiden Amerika Serikat akan kembali menegaskan peran global untuk menyuarakan kepentingan perlindungan hak asasi manusia dengan mendorong Tiongkok untuk melindungi para minoritas (CNBC Indonesia, 2021).

Kemudian, Pemberitaan yang di kutip dari berita Al Jazeera tahun 2022 dimana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, mengemukakan adanya manipulasi dan pembatasan kunjungan Kepala Hak Asasi Manusia PBB di Xinjiang. Amerika Serikat menuding pemerintah Tiongkok telah memberikan peringatan terhadap warga Uighur untuk tidak mengeluh ataupun membicarakan tentang kondisi sebenarnya yang terjadi di Xinjiang secara terbuka (Tempo, 2022). Pemerintah Tiongkok menyangkal tuduhan tersebut dengan menyiarkan pemberitaan yang sangat bersingungan dengan media barat sekaligus menyatakan protes atas tuduhan tersebut.

2. Undangan Kunjungan Jurnalis Media Internasional di Xinjiang

Selain upaya narasi global yang bernilai mendukung untuk membentuk citra positif pemerintahan Tiongkok pada aspek pembangunan, sejarah dan kritik terorisme, pemerintah Tiongkok juga menggaungkan strategi diplomasi publiknyanya dengan mendatangkan langsung para jurnalis-jurnalis media internasional di Xinjiang, baik berupa undangan dengan pembiayaan penuh maupun melalui penyelenggaraan *KTT World Media Summit*. Dalam laporan yang dirilis oleh *International Federation of Journalists (IFJ)* tahun 2020 menyatakan bahwa pemerintah Tiongkok menggunakan strategi pengundangan untuk jurnalis asing dari negara muslim ataupun non-muslim agar bisa datang mengkaji secara langsung di Xinjiang guna untuk mengontrol narasi pemberitaan buruk terhadap etnis Uighur sekaligus sebagai bentuk untuk menentang berita dari media massa internasional terkait tindakan buruk yang oleh muslim Uighur (Susilo, 2020).

Undangan jurnalis ke Xinjiang merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk memperlihatkan secara langsung Gambaran Xinjiang yang berbanding terbalik dari yang diberikan oleh media internasional terkait isu pelanggaran HAM. Program kedatangan langsung jurnalis tersebut di inisiasi oleh Komisi Urusan Dunia Maya Xinjiang, departemen pemerintahan Tiongkok pada daerah yang memegang tanggung jawab untuk mengatasi pemblokiran internet dan pengelolaan konten online di Xinjiang dan berada langsung di bawah naungan Partai Komunis Tiongkok. Program tersebut dikenal dengan program *Guangming Daily*. Dalam program tersebut, para

jurnalis yang diundang langsung oleh pemerintah Tiongkok di danai secara penuh dengan tujuan untuk memperlihatkan secara langsung kondisi Xinjiang yang damai dengan adanya kesejahteraan ekologis, persatuan, keamanan harmoni dan kemakmuran (VOA, 2024).

Selain itu, Zhang Jung, Direktur Komisi Urusan Dunia Maya Xinjiang menyatakan bahwa program ini ditujukan untuk melawan berbagai kritik terhadap Tiongkok dan mempromosikan citra positif di wilayah tersebut dengan memahami dan melihat Xinjiang dengan kepala langsung, mendeskripsikan cerita Xinjiang dengan banyak bahasa serta menyebarkan informasi kebenaran di dunia nyata. Upaya ini juga di inisiasi sebagai bentuk tanggahan Tiongkok terhadap tuduhan pelanggaran HAM berupa penahanan massal oleh Amerika Serikat dan genosida oleh PBB sebagai kejahatan manusia. Pada dasarnya, program ini juga di bentuk atas persetujuan langsung presiden Tiongkok, Xi Jinping, sebagai media untuk meningkatkan propaganda eksternal melalui multifaset, pendekatan untuk meninggikan pengaruh Tiongkok dan persepsi positif bagi Xinjiang (VOA, 2024).

Selain undangan khusus melalui *Guangmin Daily*, pemerintah Tiongkok juga gencar menarik perhatian jurnalis-jurnalis media internasional untuk datang di Xinjiang melalui penyelenggaraan *World Media Summit* ditengah kecemasan isu pelanggaran HAM yang merupakan program kolaborasi antara *Xinhua News Agency* dan pemerintahan daerah Xinjiang. Sebagai pusat pemberitaan Tiongkok, *Xinhua News Agency* menyelenggarakan program tersebut dengan tujuan menampilkan teknologi dan segala perkembangan ilmu

pengetahuan teknologi. KTT tersebut berlangsung selama tiga hari dengan lebih dari 500 peserta yang berasal dari 208 organisasi media yang terkemuka termasuk The Associated Press, Reuters dan TASS Rusia (Kashgar, 2024).

KTT tersebut dimaksudkan untuk menampilkan potensi dari Xinjiang sebagai tempat yang cocok dan terbuka untuk bisnis serta untuk melakukan pembangunan ekonomi dan modernisasi teknologi. Melalui program ini, *Xinhua News Agency* menunjukkan kondisi Xinjiang yang normal dan jauh berbeda dari isu kemanusiaan. *Xinhua News Agency* mendorong para media untuk bisa melihat situasi yang ditunjukkan di lapangan meskipun beberapa kritikus lainnya menilai kekhawatiran berlebihan. Tetapi pada faktanya, *Xinhua News Agency* mampu mengubah stigma tersebut dan pelaksanaan KTT berjalan dengan baik (Kashgar, 2024). Dalam hal ini, *Xinhua News Agency* berperan sebagai media fasilitasi hubungan internasional antara negara dengan pemerintahan Tiongkok sekaligus berperan sebagai komunitas penyelenggara program internasional di Xinjiang.

Strategi diplomasi publik yang dilakukan oleh Tiongkok dengan mengundang secara langsung jurnalis di Xinjiang mendapatkan validasi pro dan kontra dari berbagai pihak. Validasi negative di suarakan para aktivis Uighur yang mengecam pertemuan tersebut dengan menyebutnya sebagai bentuk dukungan terhadap Tiongkok untuk melekatkan pelanggaran HAM di Xinjiang. Selain itu, Mamtimin Ala, Presiden Turkistan Timur dalam pengasingan di Washington, atau ETGE mengkritik keras keterlibatan organisasi media besar dalam penyelenggaraan KTT tersebut. Ia sangat menyayangkan

kehadiran media besar di KTT sebagai bentuk keterlibatan propaganda Tiongkok dimana kehadiran media-media tersebut memberikan sebuah legitimasi yang tidak berdasar terhadap kebijakan kolonial dan genosida Tiongkok di Turkistan Timur (Kashgra, 2024).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Urusan Luar Negeri ETGE, Salih Hidayar, yang menyuarakan bahwa pertemuan KTT tersebut mampu meningkatkan kampanye manipulasi media dan propaganda yang luas untuk mengubah persepsi global terhadap kekejaman di Turkistan Timur (Kashgra, 2024). Validasi negatif lainnya juga di serukan oleh seorang jurnalis lepas Albania-Kanada, Olsi Jazexhi, yang diundang ke Tiongkok melalui kedutaan Tiongkok di kota Albania, Tirana pada tahun 2019 bersama dengan 19 jurnalis dari 16 negara. Olsi Jazexhi menyatakan bahwa Tiongkok berupaya menumpas muslim Uighur dan muslim minoritas lainnya di Xinjiang dengan menggunakan kamp-kamp yang disebutnya sebagai kamp konsentrasi guna menghilangkan identitas Islam Xinjiang, sekaligus memberlakukan genosida budaya (BBC Indonesia, 2020).

Namun pernyataan tersebut cukup terbantahkan oleh pendapat beberapa jurnalis yang ikut serta bersama Olsi Jazexhi. Dikutip dari media *China Global Time* menyatakan bahwa Olsi Jazexhi menyebarkan hoax ke publik yang dibuktikan dimana narasi-narasi yang dikembangkan oleh jurnalis lainnya menulis sisi positif dari Xinjiang sehingga pernyataan Olsi Jazexhi, dinilai keliru (Susilo, 2020). Selain itu, terdapat beberapa validasi positif lainnya yang tujuan dalam program *Guangming Daily* dan KTT *World Media Summit*

seperti jurnalis dari Turki, Erdal Emre yang datang Bersama 11 wartawan Turki lainnya melalui program *Media Trip in Xinjiang* selama 9 hari. Dalam unggahannya di platform X menyatakan bahwa kedatangannya di Xinjiang memberikan kesan positif dan jauh dari pemandangan krusial yang diisukan oleh media-media lainnya (VOA, 2024).

Jurnalis lainnya dari Filipina juga memberikan validasi yang sama dengan mengungkap bahwa pemerintah Tiongkok telah memperlihatkan pembangunan yang Tengah di lakukan untuk kenyamanan warga Xinjiang dengan berupa panorama keindahan alam sebaga upaya untuk menumpaskan teroris (Susilo, 2020). Kemudian pernyataan Waref Komaiha, Presiden Silk Road Institute for Studies and Research yang dikuti dari Xinhuan News Agency menyatakan bahwa penyelenggaraan KTT tersebut telah menunjukkan sisi Xinjiang yang jauh lebih menakjubkan dibandingkan berita palsu yang tersebar oleh media yang tidak bertanggung jawab (Kashgra, 2024).

B. Dampak Kantor Berita Cina (*Xinhua News Agency*) sebagai Aktor Diplomasi Publik terhadap Isu Muslim Tiongkok

Strategi diplomasi publik Tiongkok berupa perilisan narasi global yang memuat kondisi Xinjiang yang indah jauh dari isu pelanggaran HAM dan program mendatangkan langsung jurnalis media internasional melalui pelaksanaan event internasional, *world media summit*, di Xinjiang melalui penggunaan *international broadcasting* miliknya, Tiongkok tidak hanya meningkatkan citra positifnya di publik global, tetapi juga melakukan

propaganda secara tidak langsung guna menentang tuduhan dan kecaman yang di beritakan oleh media-media internasional dan organisasi kemanusiaan. Melalui strategis perilsan narasi global oleh *Xinhua News Agency* telah mempengaruhi stigma dan pandangan publik terhadap pemerintahan Tiongkok, utamanya di platform media seperti youtube. Selain itu, program *Guangmiang Daily* dan *KTT World Media Summit* menciptakan kolaborasi antara negara dan organisasi media internasional dengan *Xinhua News Agency* melalui perwakilan jurnalis di Xinjiang.

Sebagai media yang pengelolaannya secara langsung oleh pemerintah Tiongkok, maka setiap berita yang dirilis oleh *Xinhua News Agency* menjadi cerminan terhadap kondisi dan situasi dari Tiongkok. Konstruksi berita *Xinhua News Agency* dipergunakan oleh Tiongkok sebagai *international broadcasting* untuk memasarkan berita sebagai salah satu sarana pelaksanaan diplomasi Tiongkok terhadap berbagai negara sehingga menjadikannya satu-satunya media yang mewakili Tiongkok di skala internasional dengan jangkauan yang luas (Sugiarti, 2019: 132).

Pemberitaan yang akurat menjadikan *Xinhua News Agency* sebagai media penyiaran panutan bagi media-media Tiongkok lainnya seperti *China Daily*, *Global Times* dan *China Global television Network (CGTN)* serta *China Central Television (CCT)*. Dengan jangkauan pemberitaan yang luas di beberapa negara melalui biro penyiaran, setiap narasi global yang dirilis oleh *Xinhua News Agency* memiliki dampak strategis mengubah sudut pandang publik terhadap Tiongkok. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan jumlah

konsumsi video narasi global di Youtube yang di rilis oleh CGTN dan CCTV yang berada di bawah naungan *Xinhua News Agency* yang menggambarkan Xinjiang dari 5 aspek yakni pembangunan, budaya, alam, menangkal kritik dan narasi terror.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Hoover Institute, tercatat bahwa saluran Youtube CGTN dan CCTV pada tahun 2020 memiliki 1,7 juta pelanggan dengan tampilan sebanyak 1,1 miliar di lingkup internasional dengan total video terbanyak yang dilihat adalah Xinjiang. Total narasi video yang dirilis pada tahun 2019-2020 terdiri atas 277 video narasi Pembangunan, budaya dan sejarah sebanyak 120 video, alam 91 video, menangkal kritik 93 video dan narasi terror sebanyak 29 video. Rilis narasi global tersebut mengalami peningkatan pesat di bandingkan tahun 2018-2019 yang sebelumnya narasi Pembangunan sebanyak 270 video, budaya dan sejarah 115 video, alam 91 video, menangkal kritik 91 video dan narasi terror 23 video (Alpermaan dan Malzer, 2023).

Meski demikian, beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, menilai perilsan narasi global tersebut dibuat tidak mendasar dan sepenuhnya di kendalikan oleh partai. Pada tahun 2021, Badan Regulasi Inggris yang bertanggung jawab terhadap lisensi penyiaran, Ofcom, melakukan pencabutan lisensi penyiaran CGTN di Inggris karena dinilai keseluruhan video terkait Xinjiang dikendalikan oleh Partai Komunis Tiongkok yang bertujuan untuk mengalihkan isu HAM terhadap etnis Uighur. Kemudian Amerika Serikat mendeskripsikan bahwa narasi-narasi global yang dibentuk oleh Tiongkok

tidak dapat dipercaya dan mengandung artian berbahaya bagi masyarakat Amerika Serikat (Alpermaan dan Malzer, 2023:139).

Berbeda dengan kedua negara tersebut, Indonesia sebagai negara muslim terbesar yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok sejak tahun 1950 justru memberikan validasi positif terhadap narasi global positif Xinjiang oleh *Xinhua News Agency* melalui kolaborasi kantor berita nasional Indonesia. Beberapa narasi-narasi tersebut di nilai berdampak positif bagi kehidupan muslim Uighur di Xinjiang, namun beberapa diantaranya juga mengandung hoax yang di nilai menyembunyikan fakta sebenarnya. Narasi-narasi positif yang di maksudkan berkaitan erat dengan pengaruh *Xinhua News Agency* terhadap media nasional Indonesia. Pada tahun 2019-2021, kantor berita Metro TV dan Antaranews menandatangani perjanjian kerjasama dengan *Xinhua News Agency*. Kolaborasi tersebut tanggapan positif tentang pemerintahan Tiongkok dan pembantahan isu di Xinjiang

Dukungan terkait narasi global positif Tiongkok dengan mempublikasikan dan memvalidasi laporan khusus tentang kamp vokasional Xinjiang juga dilakukan dengan merilis ulang pernyataan narasi Beijing bahwa kamp tersebut merupakan strategi Tiongkok untuk membasmi ekstremisme di tengah etnis Uighur dan menyangkal diskriminasi yang diberitakan (freedomhouse). Kolaborasi pemberitaan *Xinhua News Agency* dengan kantor berita nasional Indonesia akan memudahkan bagi Tiongkok menyebarkan narasinya secara langsung (Yang, 2024). Meski demikian, sebagian naarsi tentang Xinjiang belum sepenuhnya berdampak. Sebanyak 15% dari tahun 2020-2021

skeptisime masyarakat Indonesia terhadap Tiongkok mengenai kebijakan kontroversial pemerintahan Tiongkok bagi komunitas etnis muslim Uighur di Xinjiang (Feedomhouse).

Selain Indonesia, beberapa negara muslim di Timur Tengah juga menganggap pemberitaan etnis Uighur oleh media Tiongkok tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah di Xinjiang. Menteri Luar Negeri Turki, Menvlus Cavusoglu, menyatakan bahwa etnis Uighur dan muslim lainnya di Xinjiang masih mengalami kesulitan untuk bisa melindungi hak mereka dalam melaksanakan ajaran agama dan identitas budayanya dan hal tersebut berbanding terbalik dari apa yang diberikan oleh media Tiongkok. Melalui tanggapan tersebut, Turki menilai bahwa pemberitaan *Xinhua News Agency* belum sepenuhnya berpengaruh untuk bisa menyelesaikan isu muslim Uighur di Xinjiang.

Berbeda dengan Turki yang menilai kontra pemberitaan *Xinhua News Agency* dan mengajak negara-negara muslim untuk menekan perhatian mereka terhadap isu HAM di Tiongkok, Iran dan Arab Saudi justru tidak memberikan tanggapan mengenai pemberitaan *Xinhua News Agency* ataupun kehidupan muslim di Xinjiang. Hal ini di dasari karena hubungan kerjasama kedua negara tersebut dengan Tiongkok sangat intens dan sangat rawan jika di kaitkan kondisi kelompok muslim dan etnis Uighur. Akibatnya, baik Iran maupun Arab Saudi sangat berhati-hati memberikan komentar terhadap masalah Uighur dan kecenderungan tersebut membuat dukungan yang diberikan kepada Uighur juga menjadi lemah (Setiawan, 2022).

Dampak lain dari perilsan narasi global positif *Xinhua News Agency* dapat mempengaruhi terjadinya “Perang Opini Publik” antara Tiongkok dengan media-media di berbagai negara. Laporan dan berita yang dirilis oleh *Xinhua News Agency* yang selalu menunjukkan kesan positif dan mendukung kebijakan pemerintah Tiongkok mampu menimbulkan penggiringan berbagai opini yang bertentangan dengan media barat. Akibatnya, *Xinhua News Agency* bisa melakukan penggiringan sudut pandang publik yang berkesan negatif terhadap Tiongkok menjadi opini positif yang mengangkat citra baik Tiongkok (Kayu, 2024). Dalam hal ini, *Xinhua News Agency* melakukan taktik sensor dan pemblokiran berita negatif terhadap PKC dan Tiongkok. Kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap terhadap berita-berita anti-Tiongkok.

Berdasarkan laporan Reuters tahun 2020 menyatakan bahwa Perusahaan Teknologi Tiongkok, *ByteDance*, melakukan penyensoran terhadap narasi bersifat kritik untuk pemerintah Tiongkok yang publish di salah satu situs berita Indonesia, Baca Berita ([freedomhouse](https://www.freedomhouse.org/)). Selain kebijakan sensor di Indonesia, pemerintah Tiongkok juga melakukan pemblokiran jam tayang berita media Inggris, BBC World News, di China tepat setelah pemerintah Inggris mencabut lisensi penyiaran otoritas milik Tiongkok, CGTN. Menurut lembaga pengatur penyiaran Tiongkok, Badan Radio dan Televisi Nasional, BBC World News dinilai telah melanggar pedoman penyiaran Tiongkok secara serius setelah melakukan liputan perlakuan dan penganiyayaan otoritas warga etnis Uighur di Xinjiang.

Akibat dampak pemblokiran tersebut, hubungan Tiongkok dan Inggris semakin buruk ditengah ketegangan pascapenerapan Undang-Undang Keamanan Nasional oleh Tiongkok di Hongkong serta adanya larangan operasional Perusahaan Telekomunikasi Tiongkok, Huawei, di London, Inggris. Tidak hanya itu, Pemerintah Inggris juga mulai menyerukan bahwa pemerintah Tiongkok bersikeras untuk menutupi sebagian besar informasi pelanggaran HAM etnis Uighur di Xinjiang dan kebijakannya yang kontroversial terhadap media-media internasional yang mencoba untuk mempropaganda (Koestanto, 2021). Penyensoran dan pemblokiran narasi kritik terhadap pemerintah Tiongkok, utamanya isu HAM di Xinjiang dapat mempengaruhi pandangan para jurnalis dan media.

Selain narasi global positif, pemerintah Tiongkok pada dasarnya juga telah mempengaruhi pendapat jurnalis melalui KTT di Xinjiang yang berakibat terjadinya perang opini dengan media barat, nyatanya juga berdampak lain terhadap keaktifan penyebaran informasi. Dengan kata lain, semakin banyak opini dan stigma negatif yang ditujukan oleh media internasional terhadap Tiongkok, maka semakin banyak pula informasi dan berita yang disebarluaskan oleh *Xinhua News Agency*. Hal tersebut di buktikan pada setiap pemberitaan yang dirilis oleh *Xinhua News Agency* mengandung berbagai propaganda untuk menentang setiap serangan informasi sehingga berakibat menimbulkan kebingungan bagi publik (Sucahyo, 2022).

Keseluruhan narasi yang disebar luaskan dan penyelenggaraan program berskala internasional berupa *Guangmiang Daily* dan *World Media Summit*

dipergunakan untuk merespon tuduhan barat sebagai bentuk propaganda balasan terhadap propaganda yang diberikan oleh media barat. Propaganda yang digunakan dalam diplomasi publik adalah untuk membentuk opini publik global yang sesuai dengan kepentingan negara untuk menggambarkan dirinya sebagai negara maju meskipun adanya masalah internal yang serius. Di sisi lain, propaganda juga digunakan sebagai alat untuk membela diri dengan mengendalikan persepsi masyarakat atau untuk menyerang pihak lain dengan mengklaim bahwa negara lain melakukan tindakan yang merugikan.

Propaganda dalam diplomasi publik pemerintah Tiongkok tidak dimaksudkan untuk melakukan manipulative yang bertujuan untuk mengendalikan persepsi global publik, melainkan untuk mempengaruhi opini publik di negara lain demi kepentingan negaranya dalam membangun citra positifnya ditengah masalah internal negaranya. Penggunaan media massa sebagai international broadcastingnya, Tiongkok berupaya melakukan penyebaran informasi yang bersifat mendukung namun dengan tetap dikontrol penuh oleh pemerintah Tiongkok sebagai negara otoriter.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jumlah entitas muslim di Tiongkok terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, kebijakan pemerintah justru menyudutkan Tiongkok dengan isu diskriminasi dan pelanggaran HAM penduduk etnis Uighur. Dalam merespon tuduhan tersebut, pemerintah Tiongkok memberlakukan strategis diplomasi publik melalui konstruksi berita oleh *Xinhua News Agency* sebagai *international broadcasting* miliknya melalui perilisan narasi global dan undangan kunjungan jurnalis di Xinjiang. Dalam hal ini, *Xinhua News Agency* berperan strategis untuk memproyeksikan dan meningkatkan citra nasional Tiongkok dengan mendapatkan dan menyiarkan berbagai informasi penting yang berkaitan erat dengan isu muslim Uighur secara akurat. Selain itu, sebagai media fasilitasi hubungan internasional antara negara dengan pemerintahan Tiongkok sekaligus berperan sebagai komunitas penyelenggara program internasional di Xinjiang.

Dengan upaya narasi global positif dan program undangan kunjungan jurnalis media internasional di Xinjiang, *Xinhua News Agency* berdampak strategis untuk mengubah dan mengiring sudut pandang publik dan negara terhadap Tiongkok melalui video dokumentasi dan artikel-artikel yang di unggah di media sosial. Perilisan narasi tersebut berhasil menarik perhatian masyarakat internasional, bahkan mengalami peningkatan. Dampak lain dari narasi global tersebut yakni terjadinya “perang opini publik” dimana

pemerintah Tiongkok mulai melakukan kebijakan sensor dan pemblokiran jam tayang terhadap media internasional yang merilis pemberitaan negatif dan kritik terhadap pemerintah Tiongkok dan kondisi di Xinjiang sehingga dinilai mampu mengubah persepsi publik terhadap kondisi sebenarnya di Xinjiang.

B. **Saran**

Penulis membatasi penelitian ini dalam lingkup diplomasi publik pemerintah Tiongkok dengan menganalisis peran dan dampak *Xinhua News Agency* yang merupakan pusat pemberitaan utama pemerintahan Tiongkok sebagai media diplomasi untuk membentuk opini publik yang bisa mengembalikan citranya sekaligus untuk merespon dan menanggapi tuduhan dan kecaman propaganda yang di beritakan oleh media barat.

Oleh karena itu, melalui penelitian ini, maka penulis menyarankan kepada peneliti akademis dan penulis lainnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait realisasi peran *Xinhua News Agency* sebagai media kebijakan *soft-diplomacy* dalam meningkatkan citra Tiongkok di tengah dsitraksi isu negatif. Selain itu, juga bisa menganalisis lebih dalam dampak keberlanjutan *Xinhua News Agency* yang tidak hanya berpacu pada isu muslim Uighur, tetapi juga untuk kepentingan nasionalnya yang bersinggungan dengan keamanan nasional Tiongkok.